



PENGARUH GLOBALISASI KEUANGAN TERHADAP KRISIS MONETER DI INDONESIA DAN SOLUSINYA

SKRIPSI

Dijadikan untuk memenuhi Salah Satu Syarat Ujian
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
Pada
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Asal:	Halaman	Klass
	1	336
Terima Tgl :	08 MAR 2002	SAS
Oleh :	0550	1 p c.1
No. Induk :		
KLA. IR / PENYALIN :		

Hartono Driadi Sastra

NIM. EI AI 95-054

Pembimbing

Drs. H. Nuruddin M. Yasin

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER

2002

PENGESAHAN

Diterima oleh Panitia Penguji
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Guna Memenuhi dan Melengkapi Salah Satu Syarat
Untuk Mencapai Sarjana Lengkap Jurusan Hubungan Internasional

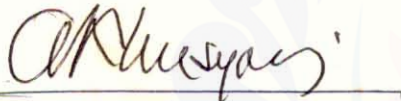
Dipertahankan di Depan Panitia Penguji Skripsi

P a d a

Hari : Senin
Tanggal : 28
Bulan : Januari
Tahun : 2002
Pukul : 08.00 WIB

Panitia Penguji

Ketua



Prof. Dr. Ahmad Khusyairi, MA

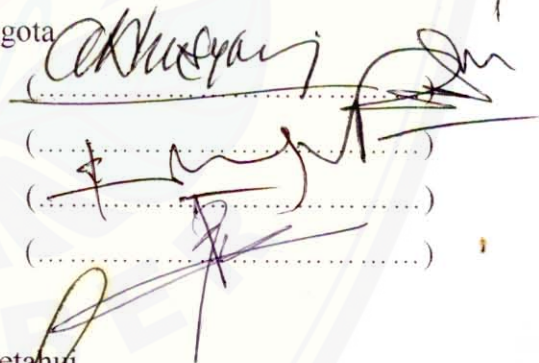
Sekretaris



Drs. H. Nuruddin M. Yasin

Anggota

1. Prof. Dr. Ahmad Khusyairi, MA
2. Drs. H. Nuruddin M. Yasin
3. Dr. Abubakar Eby Hara, MA
4. Drs. Achmad Habibullah, MSi



Mengetahui
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember
Dekan,



Drs. H. Moch. Toerki

NIP: 130 524 832

PERSEMBAHAN

***Dengan menyebut Asma Alloh Yang Maha Pengasih
Lagi Maha Penyayang, karya ini dipersembahkan
untuk:***

IBUNDA DAN AYAHANDA, Tercinta

RAHARINI, Tercinta

*..... Dan kata-kata pun tidak sanggup mengungkapkan
rasa terima kasih ini karena saya hampir tidak dapat
melakukan segalanya tanpa kamu.....*

I just loving you.....

MOTTO

1. Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Dan hanya kepada Tuhan-mu lah hendaknya kamu berharap.

(Al Qur'anul karim, Alam Nasyroh, 6-8)

2. *“Learn what is true in order to what is right, “Is the summing up of the whole duty of man.*

(“Belajarlah apa yang benar agar melakukan apa yang benar,” Adalah ringkasan dari seluruh tugas manusia).

Huxley, Thomas Henry (1825-1895) Biolog dan Penulis Inggris¹

3. *“The great tragedy of science – the slaying of a beautiful hypothesis by an ugly fact”.*

(“Tragedi menyedihkan yang paling besar dari ilmu pengetahuan adalah pembunuhan terhadap hipotesa yang baik oleh kenyataan yang buruk”).

Huxley, Thomas Henry (1825-1895)²

¹ Tim editor Mitra Utama, 1989, Percikan Permenungan, Jakarta, Mitra Utama, hal. 89

² Ibid

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan Ke Hadirat Allah SWT, Rabb pemilik hidup dan mati atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan baik, walaupun dengan proses pengerjaan yang panjang yang terkadang tidak terlepas dari keadaan penulis yang di luar peran sebagai mahasiswa juga sebagai manusia yang sedang belajar untuk menjadi lebih dewasa.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis telah mendapatkan bantuan baik secara moril maupun materiil yang tak ternilai harganya dari semua pihak. Dan untuk itulah dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Drs. H. Nuruddin M. Yasin, sebagai Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, petunjuk, dan saran serta motivasi yang berharga selama penulisan skripsi ini;
2. Drs. Sjoekron Sjah, SU, selaku Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Drs. H. Moch. Toerki, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
4. Prof. Drs. H. Bariman (Alm), selaku Dosen Wali;
5. H. M. Suparman dan Hj. Suharni, Djodje dan istri, Lita, Rian, De'ir, Om Ijay, dan Aurel, serta Saudara-saudara di Jakarta atas dukungan dan do'a-nya yang menguatkan penulis untuk menyelesaikan studi ini;
6. Raharini, yang selalu memberi yang terbaik buat penulis,..... dan tempat itu tak kan tergantikan oleh siapapun, selalu ada dan tak akan pudar, I love you so much;
7. Lembaga-lembaga yang membantu penulis dalam mendapatkan data, antara lain: DEPLU, CSIS, LIPI, Perpustakaan Pusat UNEJ dan Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;

8. Saudara Aga Nugraha dan Vivi-nya, I Wayan Wiharta Nadi dan Silvi-nya yang telah banyak menyumbangkan bahan-bahan untuk skripsi ini;
9. Team Ngetik, orang-orang yang tak mungkin penulis lupa akan perannya dalam skripsi ini: Olink (Arie Baskoro), Bob, Raharini, Tahesa Yudo Irawan, Radit, Aris, Ferry. (You guys so kind, dude....);
10. My Best Friends in Jakarta: Opy dan Ima, Dicky, Irfan, Asep "Joe", Bronson, Basuki dan Rini, Tommy (.....dan kebersamaan adalah hidup kita, kalian adalah bagian hidup yang tak mungkin terpisahkan.....);
11. Keluarga Besar Bapak Djoko Rahardjo di Jember;
12. Keluarga Besar Kost-kost-an '45: Bob, Alex, Karel, Chandra kecil dan Candra gede, Si'an, Didik, Andi, Wawan, Gusur, Wimphie, Tiko, dan tak lupa Pak Toto dan Mbak Iin;
13. My guys in Jember : Papank dan Wartel Centra, Iwan Botel, Fahmi, Ahmed, Dadang, Bobby, Jibris, Rully, Gank Wartel Centra (Mas Idos, Mbak Yuli, Sarah & Vicki, Fuad, Dadang, Erwan, Akhzat, Uyung, Cercer, dan Cak Kosim), Yokul, Niken, Toriq, Roni (karbon dan kecil), Wahyu, Gank Bu Woyo (Edo, Aris, Endri, Faisal, Cahya, Agung, Daniel, Yudi, Budi, Rofiq, Mukti, Mas Yanto, Hafid, dan Yuli), Budi & Langgeng;
14. Semua pihak dan teman yang mungkin penulis lupa sebutkan.

Hanya demikianlah yang mampu penulis lakukan sebagai penghargaan yang setinggi-tingginya atas semua bantuan yang telah diberikan.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari adanya banyak kekurangan dalam skripsi ini baik menyangkut isinya maupun teknik penulisannya. Untuk itu tentu saja dengan tangan terbuka penulis akan menerima saran agar semuanya menjadi lebih baik di kesempatan yang akan datang. Sekian banyak yang telah membantu, namun isi skripsi ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis.

Dengan segala kekurangannya, semoga saja karya ini dapat bermanfaat bagi yang berminat membacanya.

Jember, Januari 2002

Penulis



DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	i
HALAMAN MOTTO.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Permasalahan.....	1
1.2 Ruang Lingkup Pembahasan.....	14
1.3 Problematika.....	17
1.4 Kerangka Dasar Teori.....	18
1.5 Hipotesa.....	27
1.6 Metodologi Analisis dan Pendekatan.....	28
1.6.1 Metode Pengumpulan Data.....	29
1.6.2 Metode Analisa Data.....	29
1.6.3 Pendekatan.....	30
BAB II KRISIS MONETER DAN JATUHNYA RUPIAH DI INDONESIA..	33
2.1 Asal Mula Krisis.....	33
2.1.1 Faktor Internal.....	33
2.1.1.1 Lemahnya Sistem dan Fundamental Ekonomi.....	33
2.1.1.2 Masalah Ketidakpastian Politik dan Ekonomi.....	38
2.1.2 Faktor Eksternal.....	42
2.1.2.1 Gejolak Moneter dan Dampak Mekanisme Pasar Valas serta Sistem Moneter Internasional.....	42
2.1.2.2 Masalah Spekulasi dan Arus Uang Panas.....	47

BAB III IMPLIKASI DAN DAMPAK NEGATIF YANG DITIMBULKAN	
AKIBAT GEJOLAK MONETER DI INDONESIA	53
3.1 Memburuknya Perekonomian Indonesia (Krisis Ekonomi).....	53
3.2 Hilangnya Kepercayaan (Permasalahan Ekonomi-Politik yang Ditimbulkan)	59
3.3 Ketergantungan terhadap IMF dan World Bank, serta Bantuan Asing dalam Bentuk Program Talangan.....	62
3.4 Usaha-usaha yang dilakukan Pemerintah Indonesia dalam Mengatasi Krisis Moneter. (Masa Pemerintahan Soeharto dan Habibie).....	65
BAB IV BEBERAPA PANDANGAN ALTERNATIF SOLUSI KRISIS	
MONETER	70
4.1 Pengawasan Modal.....	70
4.2 Pajak Global (Tobin Tax/Pajak Tobin).....	76
4.3 Sistem Syari'ah (Sistem Moneter Islam).....	83
BAB V KESIMPULAN	105
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

**BAB I****PENDAHULUAN****1.1 Latar Belakang Masalah**

Globalisasi bukanlah fenomena baru dalam sejarah peradaban dunia. Konsep ini sudah disadari sejak jaman dahulu, dalam pengertiannya yang sederhana secara historis sejak dahulu manusia selalu memiliki keterkaitan atau ketergantungan dengan manusia lainnya. Sebagai makhluk sosial manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa manusia lainnya. Karena itulah timbul spesialisasi kerja antara tukang, petani, pedagang, pemerintah dan sebagainya. Dengan spesialisasi ini, setiap masyarakat-bangsa-negara membutuhkan masyarakat-bangsa-negara lain untuk saling memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan demikian terciptalah perdagangan. Maka sejak dulu telah disadari setiap masyarakat membutuhkan importir dan eksportir, pedagang, retailer dan sebagainya. Pendeknya, dengan meluasnya aktifitas perdagangan diantara bangsa-bangsa ini maka diperlukan alat tukar yang disebut valuta asing (*foreign exchange*) sebagai alat pembayaran yang digunakan untuk melakukan atau membiayai transaksi ekonomi dan keuangan internasional tersebut. Pada saat ini globalisasi telah mencapai bentuk barunya dalam sistem internasional dan merupakan fenomena paling nyata yang dihadapi oleh umat manusia pada saat ini serta sangat mempengaruhi aktifitas perekonomian abad 21, konsep ini telah menunjukkan penguatan eksistensi dan keniscayaan yang sulit dielakkan oleh siapapun.

Globalisasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pembuatan keputusan atau kebijaksanaan pemerintah, kesepakatan ekonomi antar negara dan tata hubungan internasional secara keseluruhan mengalami perubahan yang besar pula. Hal ini disebabkan oleh adanya penemuan-penemuan baru (*new inventions*) dan kemajuan yang pesat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta informasi. Namun kemajuan-kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tarik menarik antara paham internasionalis dengan nasionalis atau isolasionis telah menyebabkan

gelombang globalisasi mengalami pasang surut yaitu sejalan dengan siklus ekonomi dan politik dunia.

Sebagai satu sistem internasional globalisasi bukanlah suatu proses yang bersifat statis melainkan proses berkelanjutan yang dinamis yang menyentuh hampir seluruh sendi kehidupan, yang tidak saja disegala bidang (ekonomi, bisnis, budaya, politik, ideologi) melainkan juga telah masuk ke tataran sistem (*systems*), proses (*processes*), pelaku (*actors*), dan peristiwa (*events*).

Ada lima ciri pokok yang bisa diidentifikasi dari suatu proses globalisasi pada saat sekarang yaitu: **Pertama**, pertumbuhan pesat dalam transaksi keuangan internasional. **Kedua**, pertumbuhan pesat dalam bidang perdagangan, khususnya perusahaan-perusahaan multinasional. **Ketiga**, gejolak investasi asing. **Keempat**, teknologi komunikasi dan informasi serta transportasi yang sedemikian canggih. Dan **kelima** adalah munculnya pasar global.¹

Ide dasar penggerak proses globalisasi ini adalah kapitalisme pasar bebas (*free-market capitalism*) sebagaimana ditulis oleh Adam Smith pada tahun 1776 dalam bukunya *Wealth of Nations* mengenai liberalisasi (perekonomian). Menurut Adam Smith, pemerintah menjamin keberlangsungan sistem ekonomi pasar, dengan cara menegakkan hukum seadil-adilnya. Jadi minimal ada dua prasyarat: pertama, jaminan hukum (perundangan) dan kedua adalah kualitas penegakkan hukumnya. Hal ini mensyaratkan adanya keadilan.²

Pada saat ini ada ketidakseimbangan dan ketimpangan status dari negara-negara yang ada di dunia, oleh karena beberapa negara (yang disebut sebagai negara maju/utara) telah mengalami kemajuan dan memulai pembangunannya lebih awal sementara negara – negara selatan (dunia ketiga) masih terbelakang sehingga sulit untuk menyamai negara - negara maju tersebut. Namun sementara itu seluruh negara

¹ Kavaljith Singh, 1998, *Memahami Globalisasi Keuangan Panduan untuk Memperkuat Rakyat*, Jakarta; Yakoma-PGI, hal. 3-4

² Indra Ismawan, 1998, *Catatan Kritis Dimensi Krisis Ekonomi Indonesia*, Jakarta; PT Elex Media Komputindo, hal. 105

diperlakukan dengan peraturan yang sama. Dalam bidang keuangan atau finansial hal ini dideterminasikan dalam bentuk mekanisme pasar yaitu *floating exchange rate*. Floating exchange rate adalah sistem kurs mengambang, dalam hal ini nilai tukar suatu mata uang atau valas ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran di pasar uang.

Pada kurun waktu sebelum perang dunia satu sistem keuangan internasional adalah suatu sistem dengan standar emas yang menjamin uang kertas dengan emas pada harga yang tetap, namun penggunaannya mengalami pasang surut akibat ketidakkonsistenan dan ketidakstabilan negara-negara memelihara konvertibilitas emas sampai kemudian pasca perang dunia dua, para negarawan barat berusaha menciptakan tata moneter baru dengan berkumpul di Bretton Woods, New Hampshire tahun 1944. Dalam tata moneter Bretton Woods dibentuk dua kesepakatan penting *pertama*, dibentuknya IMF dan World Bank, yaitu suatu badan yang melakukan fungsi pembiayaan dan penyesuaian bagi negara anggota yang mengalami defisit transaksi berjalan. *Kedua* adalah pembentukan suatu rezim moneter yang memungkinkan penukaran mata uang berbagai negara dengan mudah dan dengan kurs yang stabil.

Pada sistem Bretton Woods, semua mata uang dunia berhubungan satu sama lain dan dikaitkan dengan nilai dolar Amerika yang nilainya secara *fixed* disetarakan dengan emas. Ini terjadi karena Amerika pada waktu itu adalah negara yang dominan dalam sistem ekonomi internasional sesudah perang dunia dua, mata uang dolar Amerika menjadi inti dari tata moneter internasional.

Sistem ini dikenal sebagai *pegged* dimana satu ons emas dijamin untuk setiap \$ 35, apabila diminta Amerika bersedia menukarkan emasnya dengan dolar yang disimpan oleh bank sentral di berbagai negara dengan nilai tukar tetap tersebut. Negara-negara lain yang bergabung dengan IMF menetapkan nilai mata uangnya terhadap dolar.

Dari tahun 1947 sampai tahun 1960, dengan dukungan kuat dari rekan ekonomi dan politik utamanya, Amerika mampu mengelola sistem moneter

internasional dengan lancar. Namun memasuki dasawarsa 1960-an defisit transaksi pembayaran Amerika yang parah mulai mendapat tantangan dari aktor lain dalam sistem internasional dan kepercayaan terhadap dolar sebagai mata uang internasional mulai berkurang.

Pada tahun 1971 setelah Amerika mengalami neraca pembayaran yang parah, pada masa itu pula tampak bahwa Amerika tidak memenuhi kewajiban penukaran dolar dengan emas secara besar-besaran, di mana nilai dolar yang disimpan pemerintah asing itu melebihi nilai cadangan emas Amerika dan menghadapi kemungkinan tuntutan bank-bank sentral negara lain untuk menukar dolar yang mereka simpan dengan emas. Maka pada tanggal 15 Agustus 1971, presiden Richard Nixon secara sepihak menghentikan sistem *fixed rate* dolar itu dan memperkenalkan sistem kurs bebas. Tiga tindakan yang dilakukan Nixon adalah: 1. menghentikan konvertabilitas dolar dengan emas dan dengan ini membuat sistem moneter sematamata berstandar dolar. 2. Mengenakan pajak impor bagi barang dari Eropa dan Jepang yang berdampak devaluasi nilai mata uang mereka terhadap dolar. 3. Menerapkan kontrol upah dan harga untuk mengendalikan inflasi dalam negeri.³

Setelah hancurnya sistem moneter Bretton Woods, muncul sistem moneter yang baru yang dikenal dengan sistem moneter pasca Bretton Woods. Cirinya adalah munculnya kurs mengambang bebas, hal ini mengakhiri standar emas. Mulailah berlaku sistem pasar uang bebas dan mata uang menjadi komoditas yang diperdagangkan di pasar uang.

Bersamaan dengan ini banyak negara berkembang mulai meninggalkan pola pengawasan arus modal, ini dimaksudkan untuk menarik minat aktivitas keuangan dunia agar mau menanamkan modalnya demi mengejar pertumbuhan dan melakukan pembangunan. Negara majupun melakukan hal yang sama.

³ Robert Gilpin, dalam Zaim Saidi, 1999, *Menimbang Kembali Uang Emas*, Jakarta; Wacana, Jurnal Ilmu Sosial Transformatif, no. III, hal. 148-149

Selain runtuhnya sistem Bretton Woods, krisis minyak global dan krisis utang mempunyai andil dalam fase membentuk globalisasi finansial. Kenaikan harga minyak pada tahun 1973-1974 menyebabkan pergerakan dana besar-besaran dari negara-negara konsumen ke negara-negara produsen minyak dan menimbulkan konsekuensi yang kompleks bagi keuangan internasional. Petro dolar ternyata lebih banyak disimpan di bank-bank barat yang kemudian harus mencari saluran investasi bagi dana-dana tersebut. Bank-bank ini lalu meminjamkan Petro dolar tersebut ke negara-negara berkembang yang dipakai untuk memenuhi anggaran dan defisit neraca pembayaran mereka. Akibatnya adalah utang luar negeri negara-negara tersebut meningkat menjadi enam kali lipat yakni dari \$ 100 milyar pada tahun 1973 menjadi \$ 600 milyar pada tahun 1979.⁴

Beberapa faktor memperbesar peningkatan volume transaksi valas dan efek sampingnya. Kecenderungan global menuju pada pasar bebas dan pergerakan dana yang lebih besar ke banyak negara. Dewasa ini arus modal swasta mendominasi total arus keuangan ke negara-negara sedang berkembang. Dari \$ 285 milyar pada tahun 1996, modal swasta mencatat \$ 244 milyar, lebih dari 80% total arus keuangan tersebut. Pinjaman melalui bank-bank komersial juga melalui peningkatan, yakni \$ 34 milyar pada tahun 1996, naik sebesar \$ 8 milyar dari tahun 1995. Mayoritas penerima pinjaman ini adalah dari sektor swasta, yang mencatat hampir 60% total pinjaman. Indonesia berada pada urutan ketiga dari lima besar negara tujuan dengan jumlah \$ 17,9 milyar pada tahun 1996.⁵

Faktor-faktor lain yang mempengaruhi dibalik melonjaknya investasi portofolio itu (globalisasi pasar keuangan) antara lain adalah, **pertama**, rendahnya suku bunga internasional dan deregulasi pasar keuangan di negara-negara tersebut. Pasar valuta asing adalah yang paling pertama memasuki globalisasi, yakni pada akhir tahun 1970-an, diikuti oleh pasar obligasi pada tahun 1980-an dan pasar ekuitas

⁴ Paul Hirst dan Grahame Thompson, 2001, *Globalisasi adalah Mitos*, Jakarta; Yayasan Obor Indonesia, hal. 25

⁵ Kavaljith Singh, *op-cit*, hal. 20-22

pada tahun 1990-an. Faktor **kedua**, negara-negara maju telah melakukan institusionalisasi tabungan yang menghasilkan modal untuk investasi dalam jumlah besar yang didukung oleh munculnya para investor institusional yang berkeinginan dan mampu melakukan investasi secara internasional. **Ketiga**, aplikasi deregulasi investasi dan swastanisasi manajemen dana pensiun di negara maju telah mempercepat pertumbuhan investasi internasional. **Keempat**, kemajuan pesat teknologi, khususnya dibidang komunikasi dan informasi yang memainkan peran pendukung yang penting dalam globalisasi pasar keuangan. Pengaruh kemajuan teknologi dalam mengatasi kendala-kendala alamiah yang berhubungan dengan tempat dan waktu adalah yang paling jelas terlihat dalam globalisasi pasar keuangan.⁶

Dalam sepuluh tahun terakhir skala dan struktur di negara-negara sedang berkembang telah mengalami perubahan yang cepat akibat globalisasi. Hal ini ditandai dengan dilakukannya liberalisasi baik secara utuh maupun ekstensif terhadap pembatasan-pembatasan dalam pertukaran, dicabutnya pengawasan investasi langsung, memperlunak pengawasan arus masuk portofolio dan melonggarkan pembatasan arus keluar portofolio serta membuka rekening modalnya secara utuh. Kesemuanya dapat terjadi karena adanya deregulasi dan globalisasi pasar uang yang telah menjadi bagian penting dalam program-program penyesuaian struktural yang diprakarsai oleh bank dunia dan dana moneter internasional (IMF). Dengan mengaplikasikan program-program penyesuaian, maka berarti negara-negara sedang berkembang harus melonggarkan pengawasan dan pembatasan-pembatasan terhadap transaksi valas dan arus modal internasional untuk mempermudah integrasi pasar domestik dengan modal global.

Kesepakatan WTO mengenai jasa keuangan dan article VIII IMF tentang kewajiban melakukan konversi mata uang dalam transaksi berjalan dapat juga dijadikan faktor dan indikator dari dilakukannya liberalisasi finansial ini yang menyebabkan terintegrasinya arus modal antar bangsa. Jumlah negara yang menerima

⁶ *Ibid*, hal. 20-22

butir VIII IMF telah meningkat tajam dari 35 negara pada tahun 1970 (yang hanya 30% dari keanggotaan IMF) menjadi 137 negara diawal tahun 1997 (76% dari keanggotaan IMF).⁷

Banyak pengamat meyakini krisis di Asia termasuk di Indonesia sejak pertengahan 1997 adalah akibat penyalahgunaan pasar bebas oleh para spekulan. Ada kesetujuan yang tersebar luas bahwa pergerakan arus modal jangka pendek (uang panas) adalah kunci penyebab dari volatilitas kurs nilai tukar. Sifat volatilitas (mudah menguap) ini dapat membantu perkembangan gagasan spekulatif dan dapat menyebabkan atau memperburuk krisis keuangan. Dalam kenyataan pasar uang *menggelembung* begitu mudahnya, ini karena sistem kurs yang berubah-ubah.

Dalam keadaan demikian suatu negara yang terintegrasi dengan pasar keuangan global akan mempunyai kecenderungan yang tinggi untuk mudah di serang oleh tindakan spekulatif yang dapat menyebabkan krisis keuangan. Inggris pernah mengalami tekanan spekulatif pada tahun 1992 yang menyebabkan ia harus mendevaluasi Poundsterling. Ini berarti walaupun tanpa suatu krisis yang sebenarnya layak diterima, sikap volatilitas yang tinggi memberikan lingkungan yang tidak baik dan tidak menguntungkan bagi perdagangan internasional dan pelunasan hutang. Pergerakan arus modal jangka pendek dengan demikian harus dibatasi dan diawasi. Sebuah pajak transaksi valas (pajak tobin) dan pengawasan modal dapat mengawasi tujuan ini. Investasi jangka pendek sering bermain pada batas keuntungan yang kecil. Spekulasi jangka pendek ini dibuat tidak menguntungkan oleh pajak tersebut. Sebagai konsekuensi, jumlah dan tindakan transaksi jangka pendek dapat dikurangi tanpa menghalangi perdagangan, kredit jangka panjang atau investasi yang benar. Ini disebut fungsi penyaring dari pajak tersebut. Tobin menggambarkan ini sebagai "*Throw some sand in the well-greased wheel of the global financial market mechanism*" ("melempar pasir dalam roda tanpa merusak roda tersebut").

⁷ *ibid*, hal. 23-24

Terhadap hal tersebut globalisasi telah menciptakan suatu sistem atau tatanan ekonomi tidak sehat yang mengakibatkan negara sedang berkembang semakin terpinggirkan (*periphery*) karena adanya kecenderungan perkembangan perekonomian yang tidak menentu dan rentan gejolak, terutama sebagai akibat dari arus finansial global yang semakin liar. Padahal tidak semua negara memiliki daya tahan yang tangguh untuk terlibat di dalam kancah lalulintas finansial global yang tidak lagi mengenal batas-batas negara dan semakin sulit dikontrol oleh pemerintah negara yang berdaulat, termasuk negara-negara maju, dan terlebih lagi negara-negara berkembang.

Dalam perekonomian yang globalized, Indonesia adalah *periphery* dan pusat peradaban kapitalis global (antara lain pasar valas dan bursa saham New York, London, Hongkong, Tokyo dan Singapura) menjadi *center*. Apa yang dilakukan pihak *center* berarti kerugian bagi *periphery*. Mengacu pada premis Raul Presbich, negara *periphery* mengalami apa yang disebut “spiral nilai tukar yang terus menurun”.⁸

Ketika US \$, Poundsterling, Yen, Dm dan Sin \$ menguat, Rupiah harus semakin lemah. Tidak mungkin terjadi, US \$ dan Rupiah mengalami gejala yang sama yaitu apresiasi atau depresiasi. Ini adalah *zero sum game*. Kalau mata uang menguat (*hard currency*) menguat, mata uang Indonesia harus lemah. Hanya pada pola *zero sum game* itulah transaksi-transaksi perdagangan valas dapat dipertahankan. Tanpa volatilitas kurs yang tajam, tidak ada keuntungan yang menarik bagi pemain di pasar valas.

Dengan demikian tersirat fakta bahwa pasar global tidaklah sempurna, baik dalam interaksi antar perekonomian negara maju maupun antara negara maju dan negara berkembang. Yaitu adanya suatu bentuk eksploitasi baru yaitu *financial - driven economies* terhadap *good-producing economies*, yaitu tindakan untuk merekayasa bentuk-bentuk transaksi-transaksi keuangan yang sifatnya semu dalam arti

⁸ Indra Ismawan, *op-cit*, hal. 100

tidak memberikan kontribusi produktif bagi peningkatan kesejahteraan riil masyarakat.⁹

Kapitalisme finansial telah banyak menimbulkan celah akan adanya eksese negatif seperti berubahnya fungsi uang tersebut yaitu uang dijadikan suatu komoditas sehingga menimbulkan spekulasi dan arus "uang panas". Fenomena di Indonesia telah menunjukkan hal demikian bahwa arus finansial bersifat spekulatif dan mudah menguap (*volatile*) sehingga menimbulkan gelombang arus modal jangka pendek dan menyebabkan ketidakstabilan ekonomi, dikarenakan arus modal ini dapat menimbulkan fluktuasi tajam pada kurs dan transaksi berjalan. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak paruh kedua tahun 1997 ini diyakini disebabkan oleh terintegrasinya Indonesia dalam pasar uang dunia akibat globalisasi.

Didalam suatu sistem kapitalis global, barang-barang, jasa, kapital dan informasi dapat bergerak melampaui semua batas negara di seluruh dunia. Kapital atau modal dapat berupa kapital industri atau kapital finansial. Kapital industri dipergunakan untuk membangun industri yang sering disebut *foreign direct investment*. Sedangkan kapital finansial digunakan untuk spekulasi didalam pasar uang global yang pada waktu ini telah mencapai jumlah dua triliun dolar sehari.¹⁰

Globalisasi finansial dalam perdagangan valuta asing timbul secara historis terutama sebagai penunjang perdagangan valuta internasional, karena pembeli dan penjual barang dan jasa antar negara memerlukan mata uang lain yang disepakati untuk menyelesaikan transaksi perdagangan mereka. Akan tetapi, dewasa ini perdagangan valuta hampir tidak mempunyai keterkaitan dengan perdagangan internasional, dimana volumenya hanya sekitar dua persen dari total perputaran uang global. Karena itu sekarang, proses globalisasi keuangan tidak lagi bersifat komplementer terhadap perdagangan dan investasi internasional, tetapi telah memiliki kehidupannya sendiri. Pada fase sekarang, arus keuangan jarang dihubungkan dengan

⁹ Faisal Basri, 1999, *Krisis Ekonomi di Tengah Gelombang Globalisasi: Implikasi Bagi Kerjasama Ekonomi di Asia Pasifik*, Jakarta; CSIS, hal. 27

¹⁰ Iskandar Alisyahbana, *op-cit*, hal. 24

arus sumber riil dan investasi produktif jangka panjang. Arus keuangan jauh lebih likuid dan lebih menarik untuk mendapatkan keuntungan (*gain*) spekulatif jangka pendek dan memiliki mobilitas yang lebih tinggi pula dan menimbulkan gelombang arus modal jangka pendek atau arus uang panas, khususnya dalam konteks negara-negara berkembang. Di samping perdagangan valuta ini, instrumen keuangan yang relatif baru seperti obligasi, reksadana, global deposit receipt dan transaksi derivatif, juga telah berkembang pesat belakangan ini dan mempunyai andil yang besar dalam perkembangan globalisasi sektor keuangan.¹¹

Sistem finansial internasional telah menjadi arena perjudian kasino global, dimana para investor mencari keuntungan yang cepat dengan mempertaruhkan jumlah uang yang sangat besar dalam hitungan jam. Mereka bermain dengan uang panas. Tidak seperti uang yang diinvestasikan secara langsung dalam produksi barang dan jasa yang mana menghasilkan keuntungan dalam jangka panjang. Uang panas menghasilkan uang dari dirinya sendiri dan itu dilakukan dengan sangat cepat. Tidak ada penciptaan lapangan kerja, tidak ada penyediaan jasa-jasa, tidak ada pabrik-pabrik yang didirikan dan tidak ada produksi. Investor-investor dalam uang panas bermain dalam surat-surat berharga dan di pasar uang untuk menanggung keuntungan dari menit ke menit, per jam atau per hari dalam fluktuasi yang terjadi pada harga atau nilai mata uang di seluruh dunia. Permainan ini sangat besar jumlahnya sekitar dua trilyun dolar sehari dari berbagai mata uang yang diperdagangkan, kebanyakan yang terjadi dalam pasar uang itu adalah murni spekulasi finansial sebagaimana para pedagang atau spekulan bertaruh atas nilai-nilai mata uang dan keuntungan kurs yang naik turun.

Para pemain-pemain itu tidak menginvestasikan uangnya dalam ekonomi riil, yang mana dapat menciptakan lapangan kerja serta produksi barang dan jasa mereka menginvestasikannya dalam ekonomi kasino yang tidak dikenai pajak. Uang telah menjadi komoditas lebih dari sebagai alat tukar dan ketika bank-bank menghasilkan

¹¹ Kavaljith Singh, *op-cit*, hal. 7-9

ratusan juta dolar setiap tahunnya, pecundang terbesar pada “perjudian modal” adalah para rakyat di negara-negara seperti Indonesia. Sebagaimana yang ditunjukkan krisis moneter akhir-akhir ini, sebuah korban kemanusiaan yang sangat besar dipaksakan untuk rakyat ketika para spekulator membuat panik, menarik uang mereka dan menyebabkan kekacaubalauan pada bidang sosial dan ekonomi. Ketika nilai suatu mata uang jatuh segera sesudah serangan spekulatif, harga barang-barang melonjak tinggi, gaji atau upah turun, perusahaan-perusahaan tidak dapat membayar hutang-hutangnya dalam satuan mata uang asing karena bangkrut dan pengangguran melonjak. Sebagaimana ekonomi antar bangsa sudah semakin terintegrasi satu sama lain (*globalized*) krisis keuangan dimasa datang tidak dapat dihindarkan kecuali jika dibuat perubahan-perubahan.

Uang yang dihasilkan melalui keuntungan dari spekulasi mata uang tidak menghasilkan kapital baru. Dalam spekulasi mata uang sebuah keuntungan untuk seorang pedagang adalah suatu kehilangan pada yang lain ini adalah sebuah *zero sum game* dari redistribusi ekuitas dengan sejumlah uang yang dipertaruhkan.

Dewasa ini proses globalisasi keuangan telah mencapai perkembangan yang pesat dan memiliki kekuatan yang lebih besar daripada globalisasi produksi. Tercatat lebih dari 1,3 trilyun perhari nilai perdagangan valas di 26 negara. Dengan 240 hari perdagangan selama 1 tahun pasar valas menghasilkan nilai 295 trilyun. Namun nilai sebesar itu tidak dapat dihubungkan dengan kegiatan produksi. Sebagai perbandingan, nilai tiap tahun perdagangan global dalam barang dan jasa adalah \$ 4,3 trilyun sedang nilai di pasar valas mencapai \$ 21 trilyun pertahunnya. Transaksi valas yang digunakan untuk produksi hanya mencapai kisaran dari 3% sampai 18%. Transaksi-transaksi tersebut dimanfaatkan untuk memenuhi kontrak-kontrak obligasi atau hedging, yaitu membeli mata uang pada harga yang tetap untuk masa yang akan datang. Sekitar 36% sampai 55% transaksi-transaksi valas yang terjadi pada pasar utama adalah transaksi spot sedang 45% sampai 64% adalah forward dan 82 % dari transaksi-transaksi diselesaikan kurang lebih dalam waktu 7 hari. Sebagian dari transaksi tersebut disalurkan oleh nasabah pokok (non finansial) berbagai macam

antara 7 % sampai 17%, ini mengindikasikan adanya proporsi yang sangat tinggi dari transaksi spekulatif.

Globalisasi finansial ditinjau dari pendekatan struktur ekonomi politik internasional, yang terjadi sebenarnya tidaklah global. Kenyataannya yang terjadi adalah ketidakseimbangan spasial sebagaimana yang ditunjukkan oleh konsentrasi kegiatan ekonomi didalam kawasan triad (Amerika Utara, Eropa Barat dan Asia Timur), Sedangkan kawasan lainnya tetap saja terbelakang dan bahkan cenderung semakin tersisih dari proses penciptaan kemakmuran. Konfigurasi telah berkembang sejak 1960-an, dan secara substansial mengalami penguatan selama dekade 1980-an. Dewasa ini produksi, perdagangan dan investasi global terpusat didalam dan diantara tiga kawasan besar tersebut, sehingga sementara kalangan menjulukinya sebagai *global triad*. *Global triad* (tritunggal) ini pada tahun 1993 menguasai tiga perempat perdagangan dunia dan memberikan kontribusi sebesar sembilan puluh persen bagi arus investasi asing langsung dunia. *Global triad* ini telah mendominasi arus keuangan global. Oleh karena itu ditinjau dari sisi struktur ekonomi politik internasional, yang terjadi bukanlah globalisasi melainkan triadisasi.¹²

Berkembangnya investasi internasional ini telah menimbulkan berbagai penyesuaian politik dunia yang signifikan. Hal ini telah menyebabkan perubahan-perubahan strategis dalam pola-pola penting tertentu di sebagian negara. Akibatnya negara bukan lagi sebagai pemain kunci seperti akhir abad 19, awal kebangkitan kembali globalisasi. Negara memang masih sebagai pemain utama di bidang politik tetapi tidak lagi di bidang ekonomi. Proses globalisasi berkembang tidak merata dari waktu ke waktu di berbagai tempat. Ketidakmerataan dan ketidak-simetrisan yang terkandung dalam proses ini, yang mengakibatkan pembangunan menjadi tidak merata pada akhir abad 19 karena alasan politik, cenderung meningkatkan pembangunan yang tidak merata pula pada akhir abad 20, namun dengan alasan-alasan ekonomis.

¹² Paul Hirst dan Grahame Thompson, *op-cit*, hal. 98

Dampak dari globalisasi mata uang telah menyebabkan hampir semua mata uang negara di dunia dinyatakan sebagai barang dagangan (*commodity*) yang siap untuk diperdagangkan ataupun sebaliknya dibantai setiap saat yang dimainkan melalui *financial engineering*. Melemah dan menguatnya mata uang suatu negara telah dikaitkan dengan kebijakan politik dan ekonomi suatu negara dengan menggunakan katalist yang tidak lain adalah para *fund managers* (spekulator). Mereka siap melakukan intervensi dengan program *trading* untuk menanggung keuntungan dalam perdagangan valuta, dimana setiap pelaku pasar uang bersifat anonim. Begitu juga dengan mata uang rupiah yang tidak terlepas sebagai bagian dari barang dagangan yang saat ini diperdagangkan di Singapura, Hongkong, London dan New York serta kota-kota lainnya.¹³

Dalam sebuah pandangan kritis terungkap suatu perspektif filosofis radikal yang menyatakan bahwa segala bentuk persoalan kemanusiaan berskala global saat ini – bukan cuma krisis moneter yang bahkan merupakan gejala belaka – adalah disebabkan oleh persoalan falsafah dasar sistem yang berlaku. Dalam hal ini krisis-krisis yang terjadi hanyalah adalah fenomena dari sistem yang memang *self destructive*. Yakni sistem moneter dan financial yang di topang oleh tiga pilar: *debt – driven development*, sistem bunga (riba), dan pemaknaan alat tukar “maya” berupa uang kertas.

Yang perlu di garisbawahi, upaya penggoyangan sistem moneter yang berdampak serius bagi perekonomian nasional serta tatanan dan sistem sosial politik tersebut cukuplah dilakukan dengan permainan di pasar uang yang kebanyakan dillakukan para *fund manager* disebuah tempat yang nun jauh disana. Permainan mereka yang tak ubahnya merupakan agresi tidak perlu mengerahkan personil militer dan persenjataannya ke bangsa dan negara lain yang menjadi sasaran juga tak perlu mengetuk tombol senjata nuklirnya guna menghancurkan teritorial lawan. Yang dilakukannya hanyalah “*mengotak-atik*” selisih antara posisi jual dan beli dari mata

¹³ Bisnis Indonesia, 14 januari 1998

uang tertentu . Aksi ini bisa dimaksudkan untuk mencari margin ditengah perbedaan kurva naik-turun nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika untuk kepentingan pribadi , tapi juga bisa dengan maksud menggoyang sistem moneter sebuah negara yang memang sedang dirancang kehancurannya. Hal ini menggambarkan betapa tebal muatan politiknya yang demikian tendensius.¹⁴

Untuk itulah perlu adanya kritik terhadap tatanan ekonomi global dan falsafah dasar sistem yang berlaku, baik mekanisme maupun kelembagaan yang turut mengaturnya, yaitu perlunya semacam pengawasan atas dampak negatif dari arus lalu lintas modal yang berupa arus uang panas dengan membentuk berbagai macam kebijakan - kebijakan yang kondusif agar keadilan dan kemakmuran dapat tercapai bersama, maka muncul dalam pemikiran penulis untuk mengajukan suatu karya ilmiah tentang:

“Pengaruh globalisasi finansial terhadap krisis moneter di Indonesia dan solusinya”

1.2. Ruang Lingkup Pembahasan

Ruang lingkup pembahasan suatu penulisan karya ilmiah sangat diperlukan. Tujuannya adalah untuk memberi batasan-batasan yang menjadi inti dari pembahasan, sehingga dapat dihindari adanya pembahasan yang terlalu luas atau kabur dari pembahasan yang sebenarnya. Selain itu untuk mempermudah dalam menganalisa suatu permasalahan secara sistematis dan terarah untuk mencapai suatu pembahasan yang komprehensif, sehingga materi pembahasan yang ditampilkan mampu menjelaskan persoalan-persoalan yang ditetapkan.

Menurut Sutrisno Hadi ruang lingkup pembahasan mempunyai maksud untuk dapat memberikan arah pembahasan yang sesuai dengan masalah serta untuk memudahkan penulis ketika kesulitan mencari data-data.

¹⁴ Ahmad Muflif Saefudin, 2001, *Regionalisasi Mata Uang Dinar: Dinar Emas Solusi Krisis Moneter*, PIRAC, SEM Institute, INFID, hal. IX

“Sekali suatu persoalan telah ditetapkan maka langkah berikutnya adalah membatasi luasnya dan memberi formasi-formasi yang tegas terhadap pokok permasalahan tersebut. Bagi peneliti sendiri, penegasan batas-batas itu akan menjadi pedoman kerja dan bagi orang lain kepada siapa laporan itu hendak disajikan atau diserahkan, penegasan selalu berfungsi mencegah kemungkinan timbulnya kerancuan pengertian-pengertian dan kekaburan wilayah persoalannya”.¹⁵

Lebih jauh lagi pembatasan ruang lingkup juga penting sebab kecenderungan pembahasan yang tidak cermat dan tidak seksama bisa dihindari sedini mungkin dengannya, Frankel mengatakan:

“Pada suatu titik tertentu, kejadian historis adalah unik, semakin luas ruang lingkup studi kita, semakin sukar untuk membuat pernyataan”.¹⁶

Dalam hal ini, kajian akan dibatasi pada keterkaitan Indonesia dengan sistem ekonomi atau finansial global dengan memperhatikan faktor internal dan eksternal yang ada dan idea-idea atau pendapat-pendapat tentang solusi yang mungkin dapat digunakan untuk mengatasi krisis moneter tersebut.

Sedangkan obyek materi yang menjadi titik berat penulisan adalah mengenai globalisasi keuangan yang telah melahirkan fenomena yang tidak kondusif bagi Indonesia yaitu menyangkut dampak negatif yang dihasilkan seperti terjadinya krisis dan kehancuran perekonomian akibat krisis moneter.

Ada dua faktor utama yang menyebabkan krisis dan kehancuran ekonomi tersebut yaitu sebab internal dan eksternal. Faktor internal menyangkut persoalan-persoalan yang ada dalam negara-negara tersebut. Sedangkan faktor eksternal berkaitan dengan sistem finansial global dan ulah para spekulan. Faktor internal turut dikaji sebagai pelengkap karena penulis menganggap faktor internal dapat menjadi

¹⁵ Sutrisno Hadi, 1994, *Metodologi Research*, Yogyakarta; Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, hal. 8

¹⁶ Joseph Frankel, 1990, *Hubungan Internasional*, Jakarta; ANS Sungguh Bersaudara, hal. 13

pemicu tindakan spekulator yang menyebabkan krisis moneter tersebut serta memperburuk tingkat krisis.

Bila dicermati, krisis moneter yang melanda Indonesia, juga belahan dunia lain, sesungguhnya dipicu oleh tiga sebab utama. **Pertama** adalah masalah interdependensi mata uang, dimana nilai mata uang suatu negara saat ini masih terikat dan saling terkait pada mata uang negara lain (misalnya rupiah terhadap US dolar), tidak pada dirinya sendiri sedemikian sehingga nilainya tidak pernah stabil, dan bila nilai mata uang tertentu bergejolak, pasti akan mempengaruhi kestabilan mata uang tersebut. **Kedua**, tidak adanya institusi governance pada tingkat global yang dapat mengatur mekanisme dan institusi pasar uang global. Masalah ini menjadi penting karena tanpa mekanisme governance (pengaturan), institusi pasar akan berkembang dalam tatanan yang amat riskan, tidak adil, mendekati hukum rimba dan sulit mengakomodasikan nilai moral serta etika. Krisis di Indonesia yang dipicu oleh spekulasi *fund manager* dan *currency traders* dapat merupakan simbol absennya institusi moral didalam mekanisme pasar uang global. **Ketiga**, Kenyataan bahwa uang tidak lagi dijadikan sebagai alat tukar saja, tetapi juga sebagai komoditi yang diperdagangkan (dalam bursa valuta asing) dan ditarik keuntungan (interest) alias bunga atau riba dari setiap transaksi peminjaman atau penyimpanan uang.¹⁷

Menurut Faisal Basri¹⁸ sistem yang ada sekarang nyata-nyata mendorong perilaku konsumtif dan bermewahan dan menyeret perekonomian untuk tumbuh secara instant. Hanya negara-negara yang cerdas dengan perangkat kelembagaan ekonomi dan politik yang mantaplah yang bisa mengeleminasikan dampak-dampak negatif dari gelombang pergerakan finansial global dengan segala macam rekayasanya yang menghasilkan gejolak kurs mata uang.

Untuk itulah suatu negara perlu menata kebijakannya sedemikian rupa agar ekses negatif dapat di hindari dan mendapatkan keuntungan optimal dari globalisasi yang sedang berlangsung.

¹⁷ Ismail Yusanto, 2001, *Mencari Solusi Krisis Ekonomi*, Jakarta; SEM Institute, hal. 3

¹⁸ Faisal Basri, *op-cit*, hal. 28

1.2 Problematika

Problematika pada hakekatnya merupakan suatu masalah yang harus dipecahkan dalam setiap penulisan ilmiah. Dengan diketemukannya problematika atau permasalahan, maka penulis dapat melakukan suatu penelitian yang terarah. Tanpa adanya problematika penelitian tidak mungkin dapat dilaksanakan.

Rumusan masalah yang jelas dan sederhana perlu dilakukan, sebab seluruh unsur penelitian akan berpangkal pada perumusan masalah tersebut.

“Masalah harus dirasakan sebagai suatu rintangan yang mesti dilalui (dengan jalan mengatasi) apabila kita ingin berjalan terus. Oleh karena itu dapat juga dikatakan bahwa masalah yang betul-betul masalah dapat dipermasalahkan. Dalam penyelidikan ilmiah permasalahan adalah unsur-unsur yang menggerakkan untuk membahasnya”.¹⁹

Menurut Guba dan Lincoln, masalah tidak sekedar rumusan yang berupa pertanyaan. Masalah adalah suatu keadaan yang bersumber dari hubungan antara dua faktor atau lebih yang menghasilkan situasi yang membingungkan. Dijelaskan pula oleh kedua ahli tersebut, bahwa faktor yang berhubungan tersebut dalam hal ini mungkin berupa konsep, data empiris, pengamatan atau unsur lainnya.²⁰

Dari uraian sebelumnya, dapat ditangkap suatu fenomena bahwa ternyata sistem keuangan yang dikendalikan pada tingkat pasar global ternyata sangat rentan dan berpengaruh sangat kuat tidak saja bagi negara berkembang seperti Indonesia tetapi juga bagi ekonomi dunia secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan bahwa globalisasi keuangan (yang ditandai oleh kematangan dan pertumbuhan institusi keuangan yang kuat) menjadi ancaman bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia. Posisi yang lemah menyebabkan sistem keuangannya tidak mempunyai daya tawar yang kuat di pasar uang global. Harga valuta dan produk-produk keuangan lainnya dikendalikan jaringan "kartel" keuangan di pasar global. Inilah yang merusak tatanan ekonomi secara keseluruhan, yang berlanjut menjadi krisis

¹⁹ Winardi Surachmad, 1975, *Pengantar Metodologi Ilmiah*, Bandung; Tarsito, hal. 77

²⁰ Lexy J. Moleong, 1989, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung; CV Remaja Karya hal. 68

moneter dan ekonomi, industri, bahkan krisis sosial dan politik seperti yang terjadi di Indonesia. Dalam hal ini jelas ada suatu permasalahan yang signifikan yaitu:

“Mengapa globalisasi finansial dapat menimbulkan krisis moneter di Indonesia dan langkah kebijakan apa yang mungkin dapat ditempuh oleh Indonesia sebagai alternatif solusi dalam menghadapi krisis moneter tersebut ?”

1.4 Kerangka dasar teori

Untuk membahas suatu permasalahan yang diajukan dalam suatu tulisan, maka diperlukan dasar-dasar teoritis sebagai landasan analisa untuk memahami fakta atau obyek yang diteliti, sehingga diperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Selain itu juga untuk mendukung hipotesis yang akan diajukan.

Teori juga merupakan sarana deskripsi dan eksplanasi serta merupakan alat yang vital dalam pengumpulan data disamping sebagai *tools of analysis* data itu sendiri. Teori terdiri dari preposisi yang menjelaskan fenomena-fenomena dan generalisasi yang dibuat sebagai awal teori. Teori berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati. Unsur teori mencakup kategori konseptual dengan kawasannya dan hipotesa atau hubungan yang digeneralisasikan diantara kategori dan kawasannya.²¹

Penggunaan teori dalam suatu penelitian ilmiah sangat mutlak diperlukan agar terdapat pijakan yang mampu menolong penulis ketika menganalisis masalah.

Secara spesifik Charles A. Mc Clelland mendefinisikan teori sebagai berikut:

1. Teori merupakan kerangka dasar untuk mengatur fakta-fakta.
2. Teori merupakan pedoman untuk melaksanakan kegiatan.
3. Teori merupakan seperangkat pertanyaan mengenai keadaan yang diharapkan.
4. Teori merupakan pikiran spekulatif, bebas dari ikatan dunia nyata.²²

²¹ Mohtar Mas'ood, 1994, *Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi*, Jakarta; LP3S, hal. 185

²² Charles A. Mc Clelland, 1982, *Ilmu Hubungan Internasional*, Jakarta; CV Rajawali, hal. 20

Kerangka dasar teori memiliki beberapa fungsi yang oleh Snelbecker dijabarkan, yaitu mensistemisasi penemuan-penemuan penelitian, menjadi pendorong penyusunan hipotesa, membimbing peneliti untuk menjawab pertanyaan.²³ Dengan demikian kerangka dasar teori, sekali lagi tidak akan dapat dihilangkan keberadaannya, supaya penelitian ilmiah menjadi valid.

Marx dan Goodson mendefinisikan teori sebagai berikut :

“aturan menjelaskan proposisi atau seperangkat proposisi yang berkaitan dengan beberapa fenomena ilmiah dan terdiri atas representasi simbolik dari : (1) hubungan-hubungan yang dapat diamati kejadian-kejadian (yang dapat diukur), (2) mekanisme atau struktur yang diduga mendasari hubungan-hubungan demikian, dan (3) hubungan-hubungan yang disimpulkan serta mekanisme dasar yang dimaksudkan untuk data dan yang diamati tanpa adanya manifestasi hubungan empiris apapun secara langsung“.²⁴

Sementara itu, secara lebih spesifik Garwin Mc Cain dan Erwin Seagal mendefinisikan teori sebagai berikut :

“Serangkaian statement yang saling berkaitan... (yang terdiri dari) : 1. kalimat-kalimat yang memperkenalkan istilah yang merujuk pada konsep dasar teori itu, 2. kalimat-kalimat yang menghubungkan konsep-konsep dasar itu satu sama lain, dan 3. kalimat-kalimat yang menghubungkan beberapa statement teoritik itu dengan segala kemungkinan obyek pengamatan empiris (yaitu hipotesa)”.²⁵

Dengan berangkat dari defenisi yang telah dijelaskan tersebut, maka Penulis berupaya menganalisa permasalahan yang sudah ditetapkan diatas dengan menggunakan teori interdependensi dalam usaha menjelaskan pengaruh globalisasi finansial ini terhadap fenomena krisis di Indonesia. Dalam pengertiannya yang sederhana, interdependensi menunjuk pada adanya kontak atau pertukaran (*exchange*) diantara bangsa-bangsa. Interdependensi timbul kalau perubahan disatu bangsa menimbulkan perubahan penting disatu atau lebih negara lain, atau dimana akibat

²³ Lexy J Moleong, *op-cit*, hal. 39

²⁴ *ibid*, hal. 35

²⁵ Mohtar Mas'oed, *op-cit*, hal.187

dari tindakan satu pemerintah sebagian ditentukan oleh apa yang dilakukan pemerintah-pemerintah lain.²⁶

Saat ini terdapat fenomena bahwa bangsa-bangsa yang ada didunia telah saling tergantung, tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi pada diri mereka sendiri, dan semakin tidak mampu menghalangi penetrasi dari luar yang berujud gagasan, kekuatan ekonomi, tekanan kultural, atau bahkan intervensi militer. Dalam keadaan demikian, semakin banyak kontak dan pertukaran dilakukan diantara negara-negara, semakin erat interrelasi mereka. Implikasi paling penting dari ini adalah bahwa Interdependensi itu bisa diantara kawan maupun diantara lawan. Pada konteks ini, masalah Interdependensi tentunya harus dihubungkan dengan unsur-unsur seperti "sensitivitas" dan "kerentanan" (*vulnerability*). Suatu negara bisa sensitif terhadap kejadian-kejadian diluarnya, dalam arti ia akan mengalami berbagai kerugian atau kesulitan kalau ia tidak berbuat sesuatu. Suatu negara dianggap rentan terhadap kejadian diluar dirinya kalau ia mengalami kerugian atau kesulitan karena tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan begitu Interdependensi berakibat bahwa pemerintah-pemerintah nasional mendapati bahwa semakin banyak urusan domestik mereka dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan eksternal dan mereka membuat keputusan sesuai dengan kenyataan itu.

Terdapat beberapa pokok argumen bahwa fenomena interdependensi semakin meningkat saat ini, yaitu:

1. Transaksi lintas batas nasional telah meningkat besar-besaran.
2. Ekonomi-ekonomi domestik sekarang lebih banyak dipengaruhi oleh perkembangan dalam ekonomi dunia.
3. Agenda politik Internasional sekarang meliputi masalah-masalah yang mengabaikan batas-batas antar bangsa, dan mengabaikan perhatian pemerintah pada masalah keamanan nasional yang didefenisikan secara sempit dan mementingkan diri sendiri.

²⁶ Mohtar Mas'ood, 1991, *Studi Hubungan Internasional Tingkat Analisis dan Teorisasi*, hal. 211

4. Organisasi "transnasional" baru, yang melompati batas-batas negara, berkembang pesat.
5. Penggunaan kekerasan untuk menyelesaikan masalah menjadi semakin tidak efektif; peranan kekuatan militer merosot dibanding dengan sebelumnya.²⁷

Disamping itu juga digunakan teori sistem kapitalis dunia, suatu sistem yang bekerja atas motif dasar manusia yang paling alamiah atau "primitif", yaitu kepentingan dan kelangsungan hidup individu. Viotti dan Kauppi²⁸ menyatakan bahwa pandangan sistem kapitalis dunia tidak hanya memberi perhatian dari kurangnya pembangunan di dunia ketiga tapi juga keinginan untuk memahami pembangunan ekonomi, sosial dan politik dari suatu wilayah atau negara di seluruh dunia. Negara berkembang dan yang masih terbelakang, para pemenang dan pecundang adalah suatu ujian dalam usaha menjelaskan pembangunan yang tidak merata dalam kehidupan global. Kedua, sarannya adalah dalam rangka memahami nasib yang berbeda-beda pada negara-negara dalam dunia ini pada waktu yang berbeda pula dalam sejarah pada konteks yang lebih luas dari keadaan politik ekonomi dunia yang sedang berkembang.

Menurut Wallerstein²⁹ upaya untuk memahami pembangunan ekonomi global dan proses sosial politik, kita harus terus memusatkan perhatian pada pengembangan kapitalisme, yaitu suatu sistem yang luas dan global sebagai suatu fenomena yang aktual. Karena dengan pemahaman yang luas dan benar pada kapitalisme sebagai suatu sistem yang benar-benar terintegrasi dengan sistem dunia (World-System), kita dapat lebih baik memahami apa yang sesungguhnya terjadi dan menimpa pada negara-negara dunia ketiga atau negara sedang berkembang dalam fenomena globalisasi ini.

²⁷ *ibid*, hal. 213

²⁸ Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi, 2nd Editon, *International Relation Theory, Realism, Pluralism, Globalism*, New York; Macmillan Publishing, hal.459

²⁹ *ibid*, hal. 460

Meskipun proses globalisasi telah berlangsung semakin dalam, tetapi bentuk dan model yang baik dan adil bagi semua (*participants*) masih belum tergambar dengan jelas. Jika yang terjadi sekedar kekuatan pasar global, maka proses tersebut hanya akan menghasilkan pemenang (*the winners*) dan pecundang (*the losers*). Sistem global dalam model seperti ini tentu tidak adil karena yang berlangsung didalamnya tidak lain adalah *Zero Sum Game*. Dalam krisis Asia, khususnya Indonesia, *the winners* adalah spekulasi-spekulasi yang bermain di pasar uang atau valuta, sedangkan *the losers* adalah pelaku bisnis dan seluruh masyarakat Indonesia.

Dalam keadaan demikian fenomena Globalisasi hanya melahirkan pola-pola hubungan yang hirarkis dan asimetris, seperti konteks dunia ke satu dan kedua vs ketiga, dunia barat vs timur, kawasan utara vs selatan, Center vs Periphery dan sebagainya, yang terjadi karena dukungan pada eksistensi kekuatan kapitalisme atau pasar global sehingga hubungan antar negara akan bersifat subordinatif dan eksploitatif.

Teori *decision making* versi James N. Rosenau³⁰ dengan variabel sistemik bisa dipakai dalam usaha menjelaskan pengambilan keputusan yang bersentuhan baik langsung maupun tidak langsung dengan globalisasi ini. Rosenau telah membagi dan mengelompokkan variabel-variabel atau unit analisis ke dalam lima kategori:

Idiosinkretik, peran, birokratik, nasional dan sistemik. Dalam konteks globalisasi, variabel sistemik bisa memberikan jawaban dalam usaha menjelaskan atau menganalisis fenomena yang terjadi karena ia telah dan dapat mempengaruhi pembuatan keputusan atau kebijakan nasional suatu negara.

Untuk melihat kaitan variabel-variabel ini dengan keputusan politik luar negeri maupun kebijakan nasional, kita bisa membagi keputusan itu kedalam tiga kategori, yaitu:

³⁰ Mohtar Mas'ood, *op-cit*, hal. 143

1. Keputusan pragmatik: yaitu keputusan besar dengan konsekuensi jangka panjang; yang dibuat berdasar studi mendetail, pertimbangan matang dan evaluasi seksama terhadap semua pilihan alternatif yang ada.
2. Keputusan krisis: yaitu keputusan yang dibuat ketika terdapat ancaman yang gawat; hanya tersedia waktu pendek untuk memberi tanggapan; dan ada unsur pendadakan yang memerlukan suatu tanggapan ad hoc dalam arti tidak ada tanggapan yang sudah dirancang lebih dahulu.
3. Keputusan taktis: yaitu keputusan penting yang biasanya berasal dari tingkat pragmatik; yang bisa di reevaluasi, direvisi, dan dibatalkan.³¹

Dalam hal ini, kasus Indonesia - pada waktu mengambil keputusan untuk melepaskan pita kurs intervensi karena ketika itu rupiah mengalami tekanan jual pada pertengahan Agustus 1997 - mungkin bisa dianalisis dengan kategori keputusan krisis, karena pada saat itu nilai rupiah terus merosot dan terus menguras cadangan devisa dalam usaha menstabilkannya. Keputusan untuk mengambangkan nilai rupiah sebebaskan-bebasnya (*free floating exchange*) ini diyakini dan karena pemerintah percaya pada mekanisme pasar bebas (sistem ekonomi dunia) dapat menyelesaikan masalah. Saat itu disadari bahwa ada periode transisi yang kritis yang menyebabkan timbulnya *overshooting* (nilai kurs yang tidak wajar, sebagai akibat dari efek-kejut psikologis).

Sejak awal dekade 1970-an, Indonesia menggunakan sistem kurs tetap (*fixed rate exchange*), lantas berganti dengan sistem semi tetap (*managed floating*) sejak 1986, kurs rupiah atas USD dibebaskan pada range tertentu. Batas-batas range ini sering disebut sebagai band (pita) kurs intervensi. Kalau kurs bergerak keluar dari range itu, Bank Indonesia harus melakukan intervensi untuk membawa kurs agar memasuki wilayah yang bisa ditolerir. Konsekuensinya, Bank Indonesia harus memiliki cadangan devisa dalam jumlah yang cukup. Pada dasawarsa 70-an dan 80-

³¹ *ibid*, hal. 143-144

an, pendapatan dari sektor migas sangat membantu ketercukupan cadangan devisa tersebut.

Pita kurs ini pada awalnya sangat sempit, hanya 2 persen. Kemudian diperlebar 13 kali, dan akhirnya dilepaskan. Ketika kurs intervensi dilepaskan pada bulan Agustus 1997, rupiah memasuki realitas baru, yakni penyerahan diri sepenuhnya ke mekanisme pasar.

Dalam variabel sistemik, unsur eksternal yaitu unsur-unsur diluar suatu negara sangat berpengaruh sekali dalam pengambilan keputusan, seperti struktur dan proses sistem internasional secara keseluruhan, aktor-aktor lain, kebijaksanaan atau tindakan negara lain dan sebagainya.

Menurut Rosenau,³² variabel sistemik umumnya lebih langsung mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh negara kecil dan lemah dari pada negara besar dan kuat. Ini karena pemeliharaan struktur dan proses sistem internasional dipengaruhi oleh keputusan yang dibuat oleh negara-negara besar yang berarti aturan main internasional ditentukan oleh negara-negara besar, dan ini akan mengikat negara-negara kecil.

Fenomena dekrit Nixon pada tahun 1971 mungkin ada korelasi dengan kerangka Rosenau ini, dimana sejak saat itu semua negara secara praktis berlaku sistem sistem kurs mengambang (*floating rate system*). Dekrit tersebut antara lain menyatakan bahwa nilai mata uang USD tidak dikaitkan lagi dengan emas. Dari uraian singkat tersebut terdapat kesimpulan bahwa pengambilan keputusan yang bersentuhan pada tingkat global lebih mengikuti aturan main negara-negara besar yang saat ini disebut sebagai tritunggal (*global triad*) yang terdiri dari amerika, Jepang dan Eropa.

Proses yang sangat kompleks dari globalisasi ekonomi dan keuangan memang telah membawa semua elemen-elemen kehidupan dan seluruh pranatanya untuk masuk secara langsung maupun tidak langsung kedalamnya. Keseluruhan perubahan

³² *ibid*, hal. 146-147

dan perkembangan institusi ini serta batasan bidang-bidang sosial dan ekonomi nasional dapat dijadikan acuan terhadap arah proses globalisasi itu sendiri. Dengan demikian, proses globalisasi sepertinya tidak terhindarkan bagi individu, masyarakat dan suatu negara untuk secara mandiri menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan nasionalnya, terlepas dari proses globalisasi itu sendiri. Apalagi dalam bidang ekonomi dan keuangan yang selama ini paling cepat prosesnya dibanding bidang-bidang lain. Dalam kerangka seperti dan jika tidak lepas dari adanya alternatif, kebijakan ekonomi dan strategi pembangunan nasional dianggap tidak relevan jika tidak paralel dengan bias globalisasi itu sendiri karena proses global tidak bisa ditolak siapapun.

Dalam kategori seperti inilah globalisasi ikut menyentuh sistem dan institusi suatu negara, sehingga bisa mensubordinasi sistem sosial politik, institusi parlemen, kepresidenan, sistem pemilihan umum dan institusi sosial politik lainnya bisa dengan mudah dipengaruhi proses globalisasi keuangan tadi, dengan aktor-aktor yang semakin krusial peranannya. Di pasar uang atau valuta tidak ada institusi moral dan etika seperti di dalam institusi sosial dan politik suatu negara. Kehadiran globalisasi dalam perspektif ini menjadi krusial, paradoks dan menciptakan suatu konflik nilai.³³

Untuk lebih memudahkan pemahaman dan membantu kita untuk memahami apa yang sedang terjadi saat ini pada konteks global atau sistem internasional, penulis memakai model hubungan asimetris dengan dua strukturnya yaitu struktur hubungan imperialisme dan interaksi feodal. Dalam model ini, hubungan internasional atau sistem internasional adalah suatu hubungan dengan struktur yang asimetris (timpang) diantara negara-negara yang ada. Menurut John Galtung, struktur hubungan imperialisme berwujud hubungan dimana negara Center (negara maju) memiliki kekuasaan atas negara Periphery (kurang maju) sehingga tercipta suatu kondisi disharmoni atau ketidakselarasan diantara keduanya. Dikatakan, bahwa pada

³³ Didik J. Rachbini, dalam *Globalisasi adalah Mitos*, hal. xi

umumnya orientasi ekonomi, sosial, politik, dan kultural para elite di negara dunia ketiga umumnya ke Amerika Serikat, Eropa Barat, atau Jepang.³⁴

Pada struktur Interaksi feodal, hubungan internasional memiliki gambaran yang berbeda, struktur hubungan internasional diwarnai oleh sifat desentralisasi atau bahkan anarki - sesuatu yang cocok untuk menggambarkan situasi pasar uang saat ini - yaitu keadaan dimana tidak ada aktor yang tunggal dan hubungan antara aktor-aktor itu tidak diatur oleh suatu badan yang secara legal lebih berwenang daripada aktor-aktor itu. Inilah hubungan yang tidak diatur oleh suatu wewenang terpusat. Dalam keadaan seperti ini lalu muncul beberapa aktor yang lebih kuat mendominasi hubungan internasional dan berusaha melembagakan struktur dan sistem tersebut, dan karena kenyataan aktor-aktor itu memiliki kekuatan yang berbeda-beda, maka yang terjadi adalah hubungan yang timpang dan terjadilah marginalisasi dan monopolisasi, suatu keadaan dimana negara-negara Periphery (kurang maju) hanya menjadi penonton dipinggiran dan tidak bisa berbuat banyak untuk merubah keadaan.³⁵

Dalam kaitannya dengan sistem keuangan global, struktur tersebut akhirnya terpecah menjadi dua, yang mapan (*established*) berada di pusat-pusat keuangan dunia (negara Center atau tritunggal) dan yang masih belum mapan atau pinggirannya (Periphery) yaitu negara-negara berkembang. Yang terjadi akhirnya adalah perkembangan institusi keuangan swasta global (tanpa *governance*), yang sangat kuat dan kemudian mensubordinasi institusi-institusi pinggirannya. Pertumbuhan institusi keuangan dunia yang terbelah atau dualisme seperti ini menyebabkan sistem keuangan negara pinggirannya atau negara berkembang dan industri sangat rentan. Akibat yang dihadapi jika tidak berhati-hati adalah fluktuasi nilai tukar, yang akan menjalar ke sektor riil, kebangkrutan sektor perbankan, hutang luar negeri tidak terbayar, inflasi yang tinggi. Bahkan karena tidak ada *governance* (misalnya, bank sentral pada tingkat internasional) pada tingkat global, resiko gejolak nilai tukar mata uang tersebut bisa merasuk ke aspek sosial dan politik

³⁴ Mohtar Mas' oed, *op-cit*, hal. 256

³⁵ *ibid*, hal. 258

1.5 Hipotesa

Pembahasan dalam suatu permasalahan yang bersifat ilmiah dirasakan perlu mengikutsertakan hipotesa dalam suatu permasalahan yang akan dibahas apalagi setelah mengupas kerangka dasar teori sebelumnya dari hipotesa ini. Adanya hipotesa yang merupakan jawaban sementara dari permasalahan yang ada. Hipotesa digunakan sebagai usaha untuk menemukan alternatif yang terdekat diantara bermacam dugaan yang mendekati. Adapun definisi dari hipotesa menurut Sutrisno Hadi diuraikan sebagai berikut :

“ Dugaan yang mungkin benar atau salah, ia akan ditolak kalau salah atau palsu dan akan diterima kalau fakta membenarkannya. Penolakan dan penerimaan hipotesa dengan begitu akan tergantung pada hasil-hasil penyelidikan terhadap fakta-fakta yang dikumpulkan. Hipotesa dapat juga dipandang sebagai konklusi, yaitu konklusi yang bersifat sementara, sebagai konklusi hipotesa tentu tidak dapat dibuat semena-mena melainkan atas dasar pengetahuan. Pengetahuan ini sebagian besar dapat diambil dari hasil-hasil dan problematika yang timbul dari penyelidikan yang mendahului dari renungan-renungan atas dasar pertimbangan-pertimbangan yang masuk akal ataupun dari hasil penyelidikan “³⁶³⁶

Oleh karena itu untuk memudahkan dalam mengambil kesimpulan pada akhir penulisan ini, maka penulis menganggap perlu menyusun suatu hipotesa dari problematika yang penulis ketahui sampai saat ini, yaitu :

“Globalisasi finansial dapat menyebabkan krisis moneter di Indonesia karena disebabkan oleh: 1. Interdependensi dalam persoalan mata uang, 2. tidak adanya institusi governance dalam tingkat global dan 3. berubahnya fungsi uang yang telah menjadi komoditas. Usulan tentang kebijakan pengawasan modal, pajak tobin serta sistem syariah mungkin dapat dijadikan acuan dalam mencari alternatif solusi krisis moneter.

³⁶ Sutrisno Hadi, *op-cit*, hal. 36

1.6 Metodologi

Setiap pemecahan atau pencapaian suatu tujuan dalam penulisan ilmiah memerlukan adanya suatu cara atau metode, baik dalam pengumpulan data maupun dalam menganalisis data yang diperoleh. Dalam menerangkan fenomena dimana untuk memahami fenomena ini peneliti harus menghubungkan fenomena yang satu dengan yang lainnya, diperkuat data-data untuk selanjutnya dianalisa. The Liang Gie³⁷ dalam bukunya yang berjudul Ilmu Politik mengemukakan pengertian dari metode penelitian adalah :

“cara atau langkah yang berulang kembali, sehingga menjadi pola untuk menggali pengetahuan tentang suatu gejala. Pada ujung awalnya ini merupakan cara atau langkah untuk mengumpulkan data-data atau langkah untuk memeriksa kebenaran dari pada pernyataan mengenai gejala tersebut “.

Dengan demikian metode penelitian dibagi menjadi dua, yaitu tahap pengumpulan data dan tahap analisa data.

1.6.1 Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data-data yang diperlukan, penulis menggunakan studi kepustakaan (*Library research*) dengan menggunakan penelitian kualitatif yang merupakan suatu observasi tidak langsung, akibat data yang diperoleh adalah bersifat sekunder. Dalam melakukan studi literatur penulis mengumpulkan data-data sekunder yang berasal dari buku-buku literatur atau buku-buku ilmiah, jurnal, artikel-artikel, majalah, surat kabar dan sebagainya. Bahan-bahan tersebut didapatkan dari berbagai sumber dan institusi yang dikunjungi, antara lain :

1. Perpustakaan pusat dan perpustakaan kampus FISIP Universitas Jember.
2. Perpustakaan Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Jakarta.
3. Perpustakaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Jakarta.

³⁷ The Liang Gie, 1984, *Ilmu Politik Suatu Bahasan Tentang Pengertian Kedudukan, Lingkungan dan Metodologi*, Yogyakarta; Gajah Mada University Press, hal. 49

4. Perpustakaan Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Luar Negeri (Litbang Deplu), Jakarta. •

1.6.2 Metode Analisa Data

Metode analisa data merupakan langkah berikutnya setelah data terkumpul, kemudian data diolah dan dianalisa, yang selanjutnya akan ditarik hasil kesimpulan dari hasil analisa tersebut. Pada karya tulis ini digunakan metode berpikir reflektif, yaitu metode berpikir yang mengkombinasikan metode deduktif dengan induktif. Pengertian cara berpikir deduktif adalah :

“ Apa saja yang dipandang benar pada semua peristiwa dalam suatu kelas atau jenis, berlaku juga sebagai hal yang benar pada semua peristiwa yang termasuk dalam jenis itu. Jika seseorang dapat membuktikan bahwa suatu peristiwa masuk kedalam kelas yang dipandang benar, maka secara logika dan otomatis orang tersebut dapat menarik kesimpulan bahwa kebenaran yang terdapat dalam kelas itu juga menjadi kebenaran bagi peristiwa-peristiwa khusus itu “³⁸

Sedangkan definisi cara berpikir induktif diuraikan sebagai berikut :

“Cara berpikir yang berangkat dari fakta-fakta khusus, peristiwa-peristiwa konkret kemudian dari fakta-fakta atau peristiwa yang khusus ditarik generalisasi yang bersifat umum”³⁹

Untuk mendapatkan analisa yang memadai, penulis terlebih dahulu akan memaparkan sejauh mana globalisasi finansial telah menimbulkan efek-efek negatif terutama yang ditimbulkan oleh penerapan sistem nilai tukar mengambang akibat konsekuensi adanya liberalisasi finansial tersebut untuk kemudian menggali gagasan-gagasan apa yang pernah muncul dalam mencari kebijakan-kebijakan serta langkah-langkah apa yang tepat guna mengatasi masalah tersebut.

³⁸ Sutrisno Hadi, *op-cit*, hal. 78

³⁹ *ibid*

1.6.3 Pendekatan

Dalam usaha untuk mencapai sasaran penulisan, maka diperlukan suatu pendekatan yang dipakai dalam upaya membantu menganalisis permasalahan. Adapun pengertian dari pendekatan menurut The Liang Gie⁴⁰ adalah :

“keseluruhan unsur yang digunakan untuk mendekati sasaran memasuki bidang ilmu pengetahuan dan menggunakan pengetahuan yang teratur bulat mengenai sasaran yang ditelaah ilmu tersebut “.

Pendekatan menurut Vernon Dyke⁴¹ adalah :

“Kriteria untuk menyeleksi masalah dan data yang relevan, dengan kata lain, pendekatan mencakup standart atau tolak ukur yang dipakai untuk memilih masalah dan menentukan data mana yang dikesampingkan”.

Dalam karya tulis ini, digunakan pendekatan makropolitik karena dalam dunia yang semakin interdependen kita harus mulai dengan menanyakan “ Apa kepentingan internasional atau globalisasi? Apa saja yang menjadi kebutuhan bersama kita? Apa yang bisa menguntungkan semua manusia?.

Menurut Sterling⁴² dalam pendekatan makropolitik, sistem ekonomi politik dunia harus memasukkan berbagai layanan kedalam rubrik keadilan dengan perluasan rasa komunitas dan kepercayaan yang dirasakan manusia. Namun perluasan rasa komunitas global untuk mencapai keadilan ini memerlukan suatu *redistribution* secara global dan meluas, kekuasaan, kekayaan, pendidikan, dan status, disamping juga redistribusi kepuasan psikologik yang muncul karena memiliki nilai-nilai tersebut .

⁴⁰ The Liang Gie, *op-cit*, hal.81

⁴¹ Miriam Budiarjo, 1982, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta; PT Gramedia Pustaka Utama, hal.4

⁴² Mohtar Mas'oed, *op-cit*, hal.223

Untuk itulah sistem ekonomi politik internasional harus bisa memberikan keadilan, tidak seperti sistem pasar•bebas (yang dipahami sebagai kebebasan bertransaksi antar negara) membuat komoditas strategis suatu negara amat tergantung pada situasi mancanegara dan tidak terjadi pada suatu *level playing field* sehingga terciptalah sistem dan pola-pola subordinatif dari negara maju kenegara-negara berkembang seperti Indonesia. Pasar (uang) ditentukan oleh kekuatan *demand* dan *supply* di pasar. Padahal pasar dipenuhi oleh para spekulan.

Disamping itu digunakan pendekatan globalis untuk melihat dan menjawab pertanyaan mengapa begitu banyak negara-negara di dunia ketiga atau negara sedang berkembang tidak mempunyai kemampuan untuk berkembang atau membangun secara semestinya.

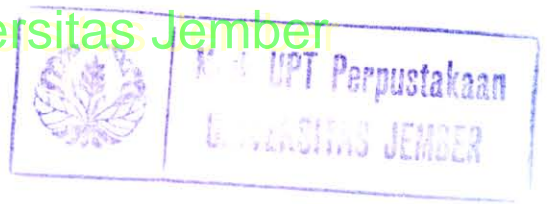
Viotti dan Kauppi menyatakan bahwa pendekatan globalis dituntun oleh empat asumsi pokok, yaitu :

1. Perlunya untuk memahami konteks global yang mana di dalamnya ada negara-negara dan entitas-entitas lain yang saling berinteraksi.
2. Menekankan pentingnya analisis historis dalam usaha memahami sistem internasional.
3. Pendekatan globalis mengasumsikan bahwa suatu mekanisme dominasi khusus hidup mengikuti negara-negara dunia ketiga dari negara yang sedang berkembang dan yang besar yang meliputi seluruh dunia, pembangunan yang tidak merata atau seimbang.
4. Bahwa faktor-faktor ekonomi adalah sepenuhnya kupasan atau tinjauan-tinjauan kritis dalam menjelaskan fungsi dan evolusi dari sistem kapitalis dunia dan penurunan dari negara-negara dunia ketiga kepada posisi yang lebih rendah.⁴³

⁴³ Viotti & Kauppi, *op-cit*, hal. 449-450

Dalam konteks pembahasan penulisan ini, pendekatan globalis digunakan untuk menelaah fenomena dampak negatif dari globalisasi keuangan ini dari level sistem internasional pada politik ekonomi domestik dalam usahanya untuk mensejahterakan umat manusia.





BAB II

Krisis Moneter dan Jatuhnya Rupiah di Indonesia

2.1 Asal Mula Krisis

2.1.1 Faktor Internal; Lemahnya Sistem dan Fundamental Ekonomi.

Krisis moneter yang melanda Indonesia sejak paruh kedua tahun 1997 menimbulkan beban yang sangat berat bagi masyarakat Indonesia. Karena fundamental ekonomi yang sangat lemah maka krisis moneter yang terjadi dengan relatif cepat menjalar menjadi suatu krisis ekonomi.

Salah satu faktor yang melatarbelakangi depresiasi nilai rupiah di pasar valuta asing adalah masalah fundamental ekonomi Indonesia yang sangat lemah dan rapuh. Sudah sejak lama (32 tahun) perekonomian Indonesia dikelola dengan sangat buruk, yang ternyata perekonomian Indonesia selama ini tidak lebih dari *bubble economy* atau perekonomian gelembung. Pertumbuhan ekonomi hanya ditopang oleh pendapatan migas, dan selanjutnya utang luar negeri, ditambah dengan liberalisasi finansial sebagai konsekuensi dari globalisasi, yaitu keleluasaan sektor swasta untuk turut serta membuka rekening utang luar negeri yang membuat perekonomian Indonesia menjadi tidak terkontrol akibat lemahnya sektor pengawasan modal dan hadirnya bank-bank luar negeri di Indonesia

Krisis adalah konsekuensi dari pertumbuhan ekonomi yang dibimbing utang (*growth lead by debt*).⁴⁴ Era penguatan peran swasta tidak didukung oleh mobilisasi tabungan domestik. Mestinya, swastanisasi diletakkan diatas pondasi ketercukupan modal domestik sehingga utang luar negeri benar-benar diposisikan sebagai pelengkap. Namun kesenjangan antara tabungan dan investasi (*saving investment gap*) telah membuka celah bagi masuknya modal asing, ketika ada guncangan pada

⁴⁴ Kompas, 8 oktober 1997

sistem politik, modal asing itupun segera henggang. Bukan cuma modal asing, modal yang dimiliki oleh masyarakat domestik pun ikut pindah ke mancanegara.⁴⁵

Selama puluhan tahun, pembangunan ekonomi Indonesia dikelola bukan dengan rasionalitas-rasionalitas ekonomi, melainkan rasionalitas politik. Pertumbuhan digenjot untuk memberi kesan keberhasilan secara makro, yang akan memberi kredit point bagi penguasa. Inflasi ditekan (antara lain dengan menggunakan metode IHK atau Indeks Harga Konsumen yang bias, bukan deflator GDP) untuk memberi image stabilitas ekonomi. Bank sentral digunakan sebagai “kasir” karena sering menerima tekanan politik untuk mencetak uang baru, demi menutupi defisit anggaran.⁴⁶

Krisis yang terjadi sebenarnya sebuah pertanda bahwa perekonomian dan fundamental ekonomi Indonesia adalah sangat lemah, karena utang luar negeri tidak seluruhnya digunakan untuk pertumbuhan melainkan digunakan untuk kolusi, korupsi dan kapitalisme kroni dan sebagainya.

Disamping itu ada suatu fenomena perekonomian yang dinamakan *Dutch Disease* (penyakit Belanda), yaitu suatu istilah yang mempunyai arti fenomena perekonomian yang hanya tergantung pada satu sektor. Perekonomian Indonesia sempat mengalami hal yang seperti ini yaitu mengenai ketergantungannya yang sangat besar terhadap sebuah sumber ekonomi tertentu dalam penerimaan devisanya, yaitu minyak dan gas bumi.⁴⁷ Dengan perekonomian yang hanya dibangun diatas satu sektor saja yakni sektor primer (pertanian, perikanan, dan pertambangan) maka bahaya “ledakan ekonomi” bisa datang setiap saat karena pada *Dutch Disease* ini tidak ada transformasi perekonomian secara sistematis yaitu pergeseran dari sektor primer menuju sekunder, lalu tersier.

Ekonomi memang tidak selamanya berkuat pada sektor primer atau pertanian. Pendapatan dari komoditas agribisnis akan jauh ketinggalan dibandingkan

⁴⁵ Indra Ismawan, *op-cit*, hal. xi

⁴⁶ *ibid*

⁴⁷ Tony A. Prasetyantono, 1995, *Agenda Ekonomi Indonesia*, Jakarta; Gramedia, hal. 158

pendapatan dari sektor industri manufaktur dan jasa. Lebih-lebih sektor jasa yang membasiskan diri pada tehnologi informasi.

Dalam dunia industri, Indonesia mempunyai tingkat ketergantungan pada komponen bahan baku impor yang tinggi, Sehingga menambah kesulitan Indonesia untuk memperbaiki kinerja ekonominya dalam memperbesar ekspor guna memperbaiki defisit neraca perdagangannya. Industri nasional berbasis impor ini artinya adalah kebijakan industri nasional bukan dibangun atas dasar kebijakan produk unggulan yang Indonesia miliki, namun lebih sebagai kebijakan asal investasi, tanpa mempertimbangkan industri mampu berdaya saing tinggi atau tidak.⁴⁸

Variabel lain dalam menjelaskan krisis moneter yang terjadi adalah apa yang dinamakan *moral hazard* (bahaya moral), yaitu meluasnya ketidak jujuran, dan tertutupan dalam dunia usaha di negara yang mengalami krisis, seperti Indonesia.⁴⁹

Adapun faktor internal lainnya adalah masih lemahnya daya saing produktifitas dan rendahnya tingkat tabungan nasional, yang memaksa otoritas moneter terus mengintervensi pasar uang domestik secara kontinyu, ditambah lagi dengan fenomena ekonomi biaya tinggi. Faktor-faktor inilah yang dapat menjadi pemicu meningginya kurs riil nilai mata uang rupiah dan juga biaya produksi barang ekspor Indonesia pada umumnya.⁵⁰

Salah satu sumber gejala moneter sekarang adalah berasal dari besarnya utang luar negeri swasta. Sebelum pecah krisis, perusahaan swasta Indonesia dengan agresif mencari pinjaman dari luar negeri. Hal ini terjadi karena adanya boom investasi yang meningkatkan permintaan kredit. Akibat pengetatan moneter yang dilakukan pemerintah, suku bunga kredit di dalam negeri meroket, jauh diatas suku bunga luar negeri. Namun yang menjadi masalah adalah **pertama**, utang swasta ini

⁴⁸ Kompas, 22 Agustus 1997

⁴⁹ Winarno Zain, 1998, dalam *Upaya Memperkuat rupiah*, Jakarta; PT Elex MediaKomputindo, hal.216

⁵⁰ M. Reza y. Siregar, *ibid*, hal. 20-21

bersifat jangka pendek, tetapi banyak digunakan untuk proyek-proyek yang menghasilkan dalam jangka panjang. **kedua** adalah bahwa utang yang dipinjam sektor swasta ini harus dibayar dengan devisa, tetapi banyak dari utang tersebut digunakan untuk industri yang melayani pasar dalam negeri, bukan untuk ekspor dan digunakan untuk industri hulu yang diproteksi, dan hanya bisa hidup di pasar dalam negeri. Karena tidak efisien, beban biaya industri hilir pemakai produknya tinggi, sehingga melemahkan daya saing mereka untuk ekspor. **Ketiga**, suku bunga yang dipakai adalah suku bunga komersial yang memberatkan dan yang **keempat**, karena jumlahnya tidak diketahui dengan persis, tidak ada yang tahu berapa besar jumlah beban dan cicilan dan bunganya, serta kapan jatuh temponya. Ini bisa mengganggu likuiditas neraca pembayaran bila jatuh tempo pembayarannya bersamaan dengan meningkatnya impor.⁵¹

Manajemen utang luar negeri tidak hanya berdampak pada tingkat mikro kerugian perusahaan, melainkan juga pada tingkat makro - ketidakseimbangan di pasar uang yang menimbulkan krisis nilai mata uang -. Bila kecenderungan ini berlangsung terus dimasa mendatang, akibat arus globalisasi dan gelombang deregulasi, maka perekonomian kita makin responsif terhadap apa yang terjadi di dunia internasional yaitu gerakan ekonomi dan moneter dunia, tapi dalam posisi yang ter subordinasi sehingga kondisi ini bisa menjadi ruang manuver yang besar bagi para spekulan dalam ataupun luar negeri untuk mengambil keuntungan dari ketidakstabilan ekonomi.

Selanjutnya dapat juga diketahui bahwa kelemahan ekonomi Indonesia antara lain terletak pada lemahnya keterkaitan (*forward and backward linkage*) antara industri di Indonesia. Lemahnya keterkaitan industri pada gilirannya telah menjadikan kegiatan ekonomi Indonesia sangat tergantung pada impor. Dengan kata lain kandungan impor dari kegiatan ekonomi di Indonesia menjadi sangat tinggi dan kandungan impor dari produk ekspor Indonesia juga sangat tinggi.⁵²

⁵¹ Winarno Zain, *ibid*, hal. 48-49

⁵² Analisis CSIS, tahun xviii/1999, no.4, hal. 329

Sistem nilai tukar mengambang (*free floating exchange rate*) yang diterapkan pemerintah sejak bulan Agustus 1997 juga mengandung sumber permasalahan yang utama. Dengan menggunakan sistem ini nilai tukar rupiah dapat berubah setiap waktu bahkan mungkin setiap detik. Bagi para pelaku bisnis, perubahan nilai tukar dengan cepat apalagi dengan fluktuasi yang sangat besar sangat menakutkan karena dengan keadaan yang seperti ini rencana bisnis menjadi sulit dibuat dan dilaksanakan.⁵³

Fundamental yang lemah juga di sebabkan oleh sistem ekonomi orde baru yang tak tahan krisis, hal ini dikarenakan pemerintahan orde baru dirasakan tidak melaksanakan dengan sungguh-sungguh dan mengabaikan ekonomi kerakyatan.⁵⁴ Menurut Prof.Mubyarto⁵⁵ kapitalisme global harus dikendalikan dengan konsep ekonomi kerakyatan yang dikembangkan agar para pemodal asing tidak menguasai perekonomian di Indonesia. Kapitalisme global selama ini dapat hadir lewat bantuan dana dan lembaga-lembaga multilateral seperti IMF, sebagai contoh *Letter Of Intent* dari IMF selalu ada klausul bagi kepentingan pemodal asing.

Selama ini memang pertumbuhan ekonomi dibangun diatas pondasi yang sangat rentan, selain mengabaikan ekonomi kerakyatan, indikator lainnya adalah **pertama**, bahwa sebagai negara terbuka, pertumbuhan ekonomi Indonesia dipacu sedemikian rupa jauh melampaui kapasitas pembiayaannya.⁵⁶ Itu tercermin pada kesenjangan antara tabungan dan investasi yang semakin melebar (*saving investment gap*). Konsekwensinya, upaya mempertahankan pertumbuhan yang tinggi, sangat tergantung pada aliran dana masuk (*capital inflows*). **Kedua**, cukup besar porsi cadangan devisa resmi pemerintah yang mencapai lebih 20 milyar dolar AS yang merupakan dana yang bersifat jangka pendek. Ketiga, jumlah utang luar negeri telah melampaui jumlah 100 milyar dolar AS dengan porsi swasta yang semakin membesar

⁵³ *ibid*, hal. 333

⁵⁴ Suara Karya, 6 februari 1999

⁵⁵ Media Indonesia, 7 Februari 1999

⁵⁶ Kompas, 18 Oktober 1997

yang juga bersifat jangka pendek dan sebagian di investasikan pada sektor-sektor yang tidak menghasilkan devisa. **Keempat**, ketergantungan industri terhadap impor dengan laju pertumbuhan yang relatif pesat. Kesemua faktor tersebut merupakan cerminan dari sisi perekonomian yang *demanding* terhadap dolar. Namun di sisi lain, kapasitas suplai devisa dari perekonomian semakin terbatas, sebagaimana tercermin dari laju ekspor yang semakin melemah.⁵⁷

Berdasarkan uraian diatas, persoalan mendasar dari gejolak moneter tidak jauh dari kapasitas suplai devisa perekonomian yang tidak mampu mengikuti dinamika permintaannya. Dan inilah yang memberi ruang bagi spekulasi untuk memetik keuntungannya melalui pasar uang. Ditambah lagi dengan kerapuhan di sektor perbankan semakin memperburuk situasi terutama ketika otoritas moneter melakukan kebijakan uang ketat.

2.1.1.2 Masalah Ketidakpastian Politik dan Ekonomi.

Salah satu faktor yang mempengaruhi depresiasi nilai rupiah adalah masalah ketidakpastian politik. Depresiasi yang terjadi adalah akibat fluktuasi nilai mata uang di pasar valas. Dalam perdagangan valas, mata uang yang mempunyai potensi fluktuasi tajam, sering disebut sebagai mata uang eksotik (*exotic currency*). Dalam hal ini para pelaku di pasar valas adalah para *fund managers* yang memainkan mata uang dalam skala besar. Rasionalitas para *fund managers* adalah menginginkan keuntungan yang maksimal. Dan keuntungan yang maksimal hanya potensial terjadi jika mereka memperdagangkan mata uang eksotik yang didalamnya banyak sekali unsur ketidakpastian. Isu-isu mengenai ketidakpastian (politik) tersebut, akan membimbing mata uang tersebut pada range yang tajam.⁵⁸

Masalah ketidakpastian akibat dari tidak jelasnya kebijakan yang ditempuh dan simpang-siurnya berita dan informasi menyangkut pernyataan-pernyataan yang dilontarkan oleh para birokrat yang tidak jelas, dapat menimbulkan kegelisahan para

⁵⁷ *ibid*

⁵⁸ Indra Ismawan, *op-cit*, hal.vii

pelaku ekonomi/pasar dan menipisnya kepercayaan para pelaku ekonomi tersebut, baik dari luar negeri ataupun domestik terhadap perekonomian kita. Kurangnya kepercayaan ini terus terjadi akan terus mengakibatkan gejolak nilai tukar rupiah.⁵⁹

Dalam hal ini demokratisasi merupakan harga mati dan faktor utama dalam hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi fluktuasi nilai mata uang. Perekonomian dan politik pada masa sekarang atau globalisasi ini merupakan dua buah aspek yang tidak dapat dipisahkan, sistem ekonomi pasar dan demokratisasi merupakan satu kesatuan ibarat “*dua roda dari sebuah pedati*”.⁶⁰ Demokrasi dan ekonomi pasar adalah dua prinsip utama suksesnya pembangunan dan reformasi politik ekonomi.

Salah satu faktor dari ketidakpastian lainnya adalah korupsi. Korupsi merupakan penyebab dari *high cost economy* dan kesulitan pengendalian jumlah uang beredar yang menjadi faktor penyebab terpenting dari krisis moneter dan ekonomi ini. Korupsi disini termasuk juga kolusi, nepotisme dan *crony capitalism* yang dijalankan oleh birokrasi.

Masalah ini menjadi penting karena masalah korupsi memiliki kaitan erat dengan daya saing investasi. Dengan menekan tingkat korupsi sangat menguntungkan bagi daya saing perekonomian suatu negara dalam menghadapi liberalisasi perekonomian global. Korupsi - baik pada proyek pemerintahan ataupun swasta - berkorelasi negatif terhadap efisiensi. Proyek pemerintah dibidang infrastruktur yang pelaksanaannya tidak ditentukan melalui tender terbuka, memiliki kemungkinan besar untuk mengalami degradasi kualitas yang berdampak langsung pada umur ekonomis dan ini tentu saja mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.⁶¹

Presiden Bank Dunia, James D Wolfensohn mengatakan bahwa korupsi memiliki dampak besar terhadap situasi ekonomi dan sosial suatu negara. Korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi, memperlambat pemerataan sosial-ekonomi, menyebabkan lemahnya fundamental dan mempengaruhi tabungan dalam negeri

⁵⁹ Sri Mulyani I. Sumartono, dalam *op-cit*, hal. 39-40

⁶⁰ Indra Ismawan, *op-cit*, hal. 85-86

⁶¹ *Ibid*, hal. 91

(*domestic saving*). Secara politik, korupsi juga dapat menjadi pemicu instabilitas yang serius.⁶²

Indonesia adalah negara yang tingkat kepastiannya paling rendah bila dibandingkan dengan negara asia lain yang terkena krisis disamping fundamental ekonomi yang lemah. Namun adanya kenyataan bahwa para pedagang valas tidak hanya menggunakan isu-isu ekonomi untuk menggoyang kurs mata uang. Mereka menyiasati perkembangan politik untuk mencari "celah terbuka" untuk menembak jatuh mata uang rupiah.⁶³

Dikaitkan dengan sistem politik, diantara keempat negara tersebut Indonesialah yang paling sarat kerawanan. Sistem politik di Indonesia memungkinkan terpeliharanya ketidakpastian (*uncertainties*) yang mempengaruhi profitabilitas investasi. Di Indonesia, dikotomi negara - masyarakat berada pada konteks hubungan yang timpang. Negara mensubordinasi masyarakat, indikatornya adalah eksekutif atau pemerintah lebih "berkuasa" dibandingkan wakil rakyat atau legislatif yang dampaknya, *check and balance* terhadap penguasa menjadi sangat lemah.

Masalah ketidakpastian ini pada akhirnya akan menjadi sebuah sebuah lingkaran setan (*vicious circle*) yang akan memperburuk keadaan. Awalnya adalah depresiasi rupiah (krisis moneter), kemudian menjadi krisis kepercayaan (*confidential crisis*), kemudian *rush* yang menyebabkan spiral inflasi, berlanjut pada ketidakstabilan atau instabilitas. Faktor ketidakpastian dan instabilitas ini memberi dampak kepada depresiasi rupiah dalam stadium lanjutan, lalu merembet lagi ke krisis kepercayaan yang semakin parah dan seterusnya.

Dengan sistem kurs bebas seperti sekarang, Indonesia semakin terintegrasi kedalam perekonomian global. Selain membawa peluang, sistem ini juga mengandung banyak resiko dan ketidakpastian. Bagi pemerintah dan para pelaku ekonomi, tidak ada pilihan lain selain menyesuaikan diri, memanfaatkan semaksimal

⁶² *Ibid*, hal. 92

⁶³ *Ibid*, hal.ix

mungkin peluang yang ada, dan meminimumkan dampak ekonomi dan finansial dari resiko dan ketidakpastian tersebut.⁶⁴ Maksud dari hal ini adalah bahwa sektor swasta dan juga negara perlu secara cermat mengelola *accounting exposure* (*perlindungan*), yaitu berbagai resiko akuntansi yang timbul sebagai akibat adanya fluktuasi kurs. Tidak seperti dulu dimana diterapkan *managed float*, dimana dapat dipastikan rupiah akan terdepresiasi sekitar 5% setiap tahunnya, fenomena inilah yang tidak cepat segera ditangkap oleh sektor swasta, banyak dari dunia usaha pada saat ini yang tidak mengelola usahanya dengan *economic exposure*, yaitu pengaruh fluktuasi kurs riil terhadap neraca dan *cash flow* perusahaan. Banyak utang swasta yang tanpa *hedging*, serta kepanikan perusahaan besar dalam mengelola utangnya yang menandakan mereka kurang profesional dan tidak bisa menerima resiko dibidang transaksi global sehingga makin memperburuk krisis akibat dari kredit macet tersebut.⁶⁵

Ketidakpastian telah menimbulkan krisis kepercayaan rakyat terhadap pemerintah Indonesia dan inilah yang oleh para pengamat dituding sebagai penyebab turunnya nilai tukar rupiah. Terbukti apapun langkah-langkah kebijakan yang diambil oleh pemerintah selalu ditanggapi negatif oleh pasar, bahkan sehari setelah presiden berpidato membacakan nota RAPBN 1998/1999 awal Januari 1998 dimana pada saat itu ia mengatakan bahwa badai pasti berlalu, Rupiah justru merosot tajam (dari Rp 6000/US dolar menjadi Rp.7900/US dolar) bahkan walaupun dengan berbagai cara telah ditempuh (adanya gerakan cinta rupiah, gerakan cinta produk dalam negeri, intervensi dari BI sebesar Rp.2,3 triliun). Rabu 11 Januari 1998, Rupiah malah merosot tajam mendekati Rp.11.000/US dolar, sama seperti seminggu sebelumnya. Faktor krisis kepercayaan terhadap pemerintah agaknya cukup masuk akal. Secara ekonomi, sulit dipahami mengapa nilai tukar rupiah bisa merosot demikian rendah. Tapi apapun penyebabnya, yang pasti ternyata rupiah terus bergejolak, naik turun dan hal itu menyulitkan ekonomi Indonesia.⁶⁶

⁶⁴ Kompas, 21 Oktober 1997

⁶⁵ *Ibid*

⁶⁶ Ismail Yusanto, *op-cit*, hal. 5

2.1.2 Faktor eksternal

2.1.2.1 Gejolak moneter dan dampak mekanisme pasar valas serta sistem moneter internasional.

Dalam era globalisasi, valuta asing (*forex*) merupakan sesuatu yang sangat penting, yaitu sebagai alat pembayaran dalam transaksi perdagangan internasional. Saat ini arus perdagangan dan investasi diantara negara-negara di dunia telah meningkat dengan pesat, hal ini ditandai dengan terdapatnya kecenderungan integrasi ekonomi regional seperti AFTA, NAFTA, LAFTA, CEE, CACM, APEC dan sebagainya. Sejalan dengan itu pasar uang (*forex market*) juga telah mengalami fenomena integrasi yaitu dengan saling terkaitnya atau tergantungnya antara bursa-bursa valas yang ada di dunia. Selain keterkaitan atau ketergantungan tersebut, globalisasi dilain pihak juga telah menyebabkan meningkatnya persaingan yang semakin ketat antar manusia, baik secara perorangan maupun kelompok, pada tingkat nasional maupun internasional. Hal itu disebabkan oleh adanya keterbatasan disatu pihak atau tempat dan kelebihan dana valas atau *forex* dilain pihak atau tempat.

Adanya keterkaitan dan persaingan karena keterbatasan ataupun kelebihan dana valas atau *forex* antar berbagai tempat di atas ternyata telah menyebabkan valas itu sendiri ditransaksikan atau diperdagangkan sebagai komoditas atau benda ekonomi di bursa valas. Bursa atau pasar valas dalam hal ini diartikan sebagai suatu tempat atau wadah atau sistem dimana perorangan, perusahaan, dan bank dapat melakukan transaksi keuangan internasional dengan jalan melakukan pembelian atau permintaan (*demand*) dan penjualan atau penawaran (*supply*) atas valas atau *forex*.⁶⁷

Berbagai fenomena tersebut ternyata telah menyebabkan *discrepancies*, yaitu perbedaan kurs valas di berbagai bursa valas atau *forex market* dari berbagai negara. *Discrepancies* tersebut akan selalu terjadi dan tidak dapat dihilangkan ataupun di kurangi karena masing-masing negara masih memiliki sistem mata uangnya sendiri-sendiri dan karena secara praktis sejak dekrit Nixon tanggal 15 Agustus 1971 berlaku

⁶⁷ Hamdy Hady, 2001, *Valas untuk Manajer*, Jakarta; Ghalia Indonesia, hal. 16

sistem kurs mengambang atau *floating exchange rate*. Keadaan ini menyebabkan timbulnya perdagangan valas yang dikenal sebagai *international arbitrage*, yaitu perdagangan valas yang sudah dianggap sebagai komoditas, untuk mencari keuntungan dari perbedaan *forex quotation* atau kurs valas dari berbagai tempat atau bursa valas. Menurut *annual report* dari *bank for international settlement* (BIS) perkiraan total *net turn over global forex market* pada tahun 1989 mencapai USD 640 miliar. Volume transaksi global harian *forex market* pada bulan april 1992 sudah mencapai USD 1,353 miliar. Dan menurut Bank Indonesia (bank sentral), volume *trading* valas di jakarta pada awal 1996 mencapai sekitar USD 5 miliar per hari.⁶⁸

Perdagangan valas yang sering disebut sebagai arbitrase atau *International arbitrage* diartikan sebagai usaha kapitalisasi atas perbedaan *quoted price* atau kurs jual dan kurs beli valas diberbagai bursa valas, yang terjadi karena adanya perbedaan permintaan dan penawaran di berbagai tempat. Perdagangan atau arbitrase valas di pasar uang biasanya dikenal dalam tiga bentuk, yaitu:

1. *locational arbitrage*, yaitu arbitrase yang terjadi bila ada perbedaan kurs jual dan beli antar bank atau antar *money changer*. Perbedaan itu akan memberi peluang pada *arbitrageur* atau pedagang valas untuk mencari keuntungan dari selisih kurs jual dan beli dari bank yang berbeda. Perbedaan kurs jual dan beli dari beberapa bank pada lokasi atau kota yang sama dapat terjadi karena adanya perbedaan penawaran dan permintaan yang dihadapi.
2. *Triangular atau international arbitrage*, adalah jenis arbitrase atau perdagangan valas yang dilakukan oleh para arbitrase dengan membandingkan *cross exchange rate* antara tiga lokasi atau tempat yang berbeda. Hampir sama pada *locational arbitrage*, *international triangular arbitrage* ini juga harus dilakukan secara cepat sehingga hanya bisa dilakukan oleh para *arbitrageur* atau *forex dealer* yang mempunyai terminal komputer dan mempunyai *link* (jaringan) atau yang dapat akses ke berbagai bursa valas internasional.

⁶⁸ *Ibid*, hal. 76-77

3. *Covered interest arbitrage* (CIA), adalah aktivitas yang dilakukan *arbitrageur* untuk mencari untung dari perbedaan antara selisih tingkat bunga dengan *forward rate premium* atau *forward rate discount*. CIA dilakukan dengan jalan menginvestasi dana dalam sekuritas luar negeri karena terdapat perbedaan selisih tingkat bunga dengan perubahan kurs valas atau tingkat premium atau discount.⁶⁹

Gejolak moneter merupakan salah satu faktor yang menyebabkan jatuhnya nilai Rupiah. Hal ini terjadi karena adanya liberalisasi pada sektor finansial yang mengandung konsekuensi adanya keharusan suatu sistem mekanisme pasar pada pasar keuangan global. Namun begitu mekanisme pasar bisa menjadi bumerang dan kesalahan yang fatal bila diterapkan tanpa adanya mekanisme aturan dan mekanisme pengawasan yang ketat akan menyebabkan gejolak di sektor moneter.

Kasus Indonesia merupakan sebuah kegagalan pasar (*market failure*) yang paling serius. Yakni kegagalan sistem nilai tukar bebas (*free float exchange*) yang dipakai bank sentral semenjak 14 Agustus 1997. Menurut sistem ini, kurs devisa ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan di pasar valuta asing.⁷⁰ Padahal dengan menggunakan mekanisme tersebut sebuah mata uang dapat berfluktuasi sangat cepat yang ditandai dengan naik turunnya nilai mata uang tersebut dalam sistem keuangan. Hal inilah yang merupakan salah satu sebab eksternal dari jatuhnya mata uang-mata uang di Asia Tenggara khususnya rupiah.

Tulang punggung ideasi mekanisme pasar adalah: harga adalah titik temu penawaran dan permintaan. Kenyataan menunjukkan bahwa konstruksi teoritis diatas tidak sepenuhnya benar. Di pasar valuta asing, harga adalah titik temu berbagai rumor dan kecemasan. Pedagang valas adalah mereka yang menjajakan kegelisahan. Kini pasar valuta asing dihiasi oleh struktur yang oligopolistik. Beberapa *fund managers* dengan bermodalkan miliaran dolar AS, mampu menjatuhkan nilai mata uang eksotik

⁶⁹ *Ibid*, hal. 78-83, Kurs forward adalah kurs yang ditetapkan sekarang atau pada saat ini, tetapi diberlakukan untuk waktu yang akan datang (future period) antara 2 x 24 jam lebih sampai dengan 1 tahun. Rate Premium terjadi bila jatuh tempo, kontraknya mengalami apresiasi dan sebaliknya dengan rate discount yaitu depresiasi.

⁷⁰ Indra Ismawan, *op-cit*, hal.5

(mata uang yang lemah) dalam hitungan waktu sekian jam. Kalau terjadi depresiasi tajam, mata uang eksotik tersebut akan dilepas oleh masyarakat. Hal ini akan menambah tekanan jual yang berdampak pada depresiasi yang makin parah.⁷¹

Berbagai krisis keuangan menjadi tanda bahwa kadang pasar bebas tidak sepenuhnya rasional. Unsur irrasional manusia, seperti mania dan panik, cepat berkembang dan besar pengaruhnya mengombang-ambingkan kondisi ekonomi. Apalagi tidak semua pelaku ekonomi terinformasikan dengan baik atas apa yang terjadi. Faktor eksternal yang disebut mania dan panik ini dapat terjadi karena adanya *displacement* (pemindahan mendadak) yang mengganggu sistem makro ekonomi.⁷²

Fluktuasi yang terjadi pada sekitar tahun 1995 antara nilai tukar yen dan dolar sudah begitu besar sehingga mengganggu stabilitas sistem keuangan internasional. Negara-negara yang lebih kecil seperti Indonesia, yang lebih tergantung pada ekonomi internasional tidak punya pilihan lain yaitu mereka memilih melakukan semacam pematokan nilai tukar atau sekurang-kurangnya menyesuaikan kebijakan ekonomi makro mereka ketika ada ancaman tingkat nilai tukar itu keluar jalur. Dan kebanyakan negara-negara di Asia tenggara khususnya di Indonesia melakukan pematokan nilai tukarnya kepada dolar. Hal inilah yang ikut menyebabkan munculnya krisis mata uang rupiah.

Patron ekonomi Indonesia yang merupakan negara Jepang juga menjadi masalah bila dilihat keterkaitan transaksi perdagangan dan bantuan yang sangat besar dan menonjol antara Indonesia dan Jepang. Jepang diperlukan sebagai lokomotif dalam usaha menggerakkan perekonomian Indonesia. Yang menjadi masalah adalah adanya fenomena yendaka, yaitu menguatnya yen jepang terhadap dolar Amerika yang mengakibatkan terganggunya neraca pembayaran kedua negara tersebut dan dampaknya dapat mengimbas ke Indonesia.⁷³

⁷¹ *Ibid*, hal. 63

⁷² Denny j.A, dalam *op-cit*, hal. 12

⁷³ Analisis CSIS, *op-cit*, hal. 341. Dengan keadaan ini, perekonomian Jepang akan menanggung resiko yang buruk karena yen over valued. Kalau perekonomian jepang sampai bermasalah, otomatis dampaknya akan sampai ke Indonesia.

Akibat liberalisasi finansial telah menyebabkan deregulasi arus masuk dan keluar modal, hal ini menyebabkan neraca modal yang sangat terbuka ini telah membuat kita berada dalam posisi yang tidak cukup aman. Keluarnya modal swasta dengan sangat cepat dan besar-besaran, yang mengikuti serangan spekulasi terhadap mata uang Thailand, telah menjadi pemicu krisis di Indonesia.⁷⁴

Pra kondisi yang memungkinkan semua itu terjadi adalah kenyataan bahwa adanya ketimpangan jumlah uang beredar pada taraf global, dengan nilai transaksi di sektor riil. Ketimpangan ini menjadi spekulasi global yang sangat berbahaya bagi negara berkembang, nilai transaksi valas dunia.

Dipasar valas tidak ada koreksi terhadap *excess* (kelebihan) *demand dan excess supply*. Di pasar barang *excess demand* akan menaikkan harga. Namun pada taraf tertentu harga akan turun karena adanya pasokan barang yang lebih banyak. *Excess supply* juga akan memerosotkan harga, akan tetapi akan segera direspon dengan berkurangnya suplai sehingga hargapun terangkat ke titik keseimbangan baru. Namun di pasar valas, *law of demenishing return* tidak berlaku, sehingga *excess demand* terhadap dollar tidak berarti mengalirnya *greenback* kepasar. Likuiditas Dollar tetap terbatas karena “produsen” Dollar AS yakni *federal reserve* tidak dapat mencetak uang begitu saja karena harus sesuai dengan permintaan pasar.⁷⁵

Selain itu pasar valas juga mempunyai banyak bentuk-bentuk instrument keuangan. Diantaranya adalah *Currency futures market* (CFM). Instrument ini sering digunakan oleh para pengusaha atau *arbitrageur* (pedagang valas) untuk melindungi posisi forex-nya atau untuk berspekulasi mencari keuntungan terhadap fluktuasi *forward rate*, caranya adalah dengan memperhatikan *future currency movement*. *Forward rate* (kurs forward) adalah kurs yang ditetapkan sekarang atau pada saat ini, tetapi diberlakukan untuk waktu yang akan datang (*future period*) antara 2 x 24 jam lebih sampai dengan 1 tahun. *Forward rate* atau *forward market* ini timbul karena adanya ketidakpastian dan fluktuasi kurs valas. Hal ini terutama terjadi semenjak

⁷⁴ *Ibid*, hal. 356

⁷⁵ Indra Ismawan, *op-cit*, hal . 8

berlakunya sistem kurs mengambang setelah dekrit Nixon. Dekrit tersebut antara lain menyatakan bahwa nilai mata uang USD tidak lagi dikaitkan dengan emas.⁷⁶

Secara ringkas, jika spekulator memperkirakan suatu valas akan apresiasi tentu dia akan membuat *futures contract* untuk *specific settlement date* sehingga dia dapat membeli valas sesuai dengan *rate* atau kurs tertentu. Jika pada waktu jatuh tempo *futures contract*-nya ternyata *spot rate* lebih tinggi dari pada *futures contract*-nya, spekulator tentu akan mendapat keuntungan dari selisih kurs antara *spot rate* dan *futures contract rate*-nya.

Sebaliknya, jika spekulator mengadakan *selling futures contract* dengan memperkirakan suatu valas akan depresiasi, dia mengharapkan akan mendapat keuntungan dari selisih pembelian valasnya dengan *spot rate* yang relatif murah terhadap kontrak penjualan valasnya dengan kurs yang relatif lebih tinggi.

Persoalan mata uang merupakan persoalan yang essential dalam memicu krisis ekonomi ini, dimana nilai mata uang suatu negara saat ini pasti terikat kepada mata uang negara lainnya (misalnya, rupiah dengan dollar AS) tidak pada dirinya sendiri sedemikian sehingga nilainya tidak pernah stabil, dan bila nilai mata uang tertentu bergejolak, pasti akan mempengaruhi kestabilan mata uang tersebut.⁷⁷

Untuk saat ini ekonomi pasar telah disalahgunakan (*abused*) oleh para spekulasi ini. Uang yang dulu diciptakan sebagai alat tukar guna memperlancar perdagangan, sekarang ini sudah dijadikan barang dagangan itu sendiri. Dan pasar itu menggelembung begitu mudahnya, karena sistem kurs yang berubah-ubah dibiarkan mengikuti "pasar uang".

2.1.2.2 Masalah spekulasi dan arus uang panas.

Proses globalisasi saat ini telah berkembang sangat cepat dan sedemikian rupa sehingga menimbulkan ciri-ciri tersendiri dalam segala bidang kehidupan. Dalam bidang finansial ciri-ciri yang menonjol saat ini yaitu adanya arus uang dan modal

⁷⁶ Hamdy Hady, *op-cit*, hal. 22-23

⁷⁷ Ismail Yusanto, *loc-cit*, hal.3

dalam bentuk valas atau *foreign currency* antara berbagai pusat keuangan di berbagai negara yang semakin besar dan cepat, seakan-akan mengalir tanpa mengenal kewarganegaraan pemiliknya dan tanpa batas wilayah (*borderless*). Arus uang atau aliran valas dari tempat yang surplus ke tempat yang defisit ini biasanya digunakan untuk keperluan perdagangan, investasi dan spekulasi. Namun saat ini arus uang untuk keperluan perdagangan dan investasi mengalami kesenjangan yang sangat luas dan lebar dengan perdagangan valas untuk spekulasi. Sebagai perbandingan jumlah transaksi yang digunakan untuk keperluan perdagangan dan investasi hanya 5 persen dari jumlah keseluruhan, 95 persen lainnya adalah untuk kegiatan spekulasi. Memang terdapat beberapa faktor atau kondisi yang berbeda sehingga dapat mempengaruhi dan menimbulkan perbedaan kurs valas di masing-masing tempat diantaranya adalah supply dan *demand foreign currency*, posisi *balance of payment* (BOP), tingkat inflasi dan bunga, tingkat income, pengawasan pemerintah, ekspektasi dan spekulasi.

Seperti yang telah dijelaskan diatas, Sistem nilai tukar mempunyai karakteristik tersendiri, muncul terutama dari perdagangan valas. Ini dikarenakan transaksi valas dapat menjadi tujuan dari tindakan spekulasi selain dari arbitrase itu sendiri.

Berbeda dengan tindakan arbitrase, tindakan spekulatif valuta asing tidak berdasarkan atas pengetahuan akan perbedaan harga secara signifikan, tetapi atas suatu prediksi bahwa harga-harga mata uang akan berubah. Transaksi-transaksi tersebut sering tidak berdasarkan atas perkiraan-perkiraan dari nilai-nilai ekonomi riil tetapi berdasarkan prediksi perdagangan spekulatif dari pedagang-pedagang yang lain.

Untuk kasus Indonesia, Faktor-faktor spekulatiflah yang berpengaruh kuat terhadap situasi krisis moneter. Pada dasarnya ekspektasi dan spekulasi yang timbul di masyarakat tersebut akan mempengaruhi permintaan dan penawaran valas yang akhirnya akan mempengaruhi kurs valas atau *forex rate*. Fluktuasi nilai rupiah terhadap US dolar yang sangat besar sejak akhir Juli sampai dengan Desember 1997 adalah diyakini karena adanya peranan tindakan spekulatif karena pada saat itu

kondisi fundamental ekonomi makro Indonesia seperti tingkat inflasi posisi BOP dan lain-lain relatif baik. Salah satu contoh kongkrit adalah naiknya kurs US dolar, hingga mencapai sekitar Rp.6000/USD, karena adanya isu atau rumor sekitar kesehatan presiden pada bulan November/Desember 1997. Dengan demikian hal ini menunjukkan bahwa faktor yang paling berpengaruh adalah unsur spekulasi atau isu atau rumor yang beredar di masyarakat dan keadaan ini hanya dapat dijelaskan atau dilihat dari aspek politik dan sosial ekonomi.⁷⁸

Dengan demikian terlihat jelas bahwa gelombang arus modal jangka pendek atau disebut juga arus uang panas, khususnya dalam konteks negara-negara berkembang memperlihatkan fakta bahwa arus ini mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap timbulnya situasi krisis di negara-negara berkembang khususnya Indonesia pada tahun 1997. Karena sifatnya yang spekulatif dan mudah menguap, arus modal ini dapat menimbulkan fluktuasi tajam pada kurs dan transaksi berjalan. Bahkan negara-negara majupun tidak dapat menangkal fenomena ini. Misalnya tekanan serupa yang dialami Poundsterling pada tahun 1992, dimana para spekulasi mampu mendikte bank sentral serta memaksa devaluasi. Dengan demikian, argumentasi yang dikemukakan oleh para investor institusional asing dan pengamat lainnya bahwa arus tersebut mampu menjamin stabilitas dan cenderung membantu perekonomian suatu negara, terbukti bertentangan dengan pengalaman-pengalaman ini.⁷⁹

Terus merosotnya nilai tukar dollar AS terhadap yen Jepang tidak hanya berdampak terhadap kondisi keuangan banyak negara. Melainkan menimbulkan pertanyaan terhadap sistem nilai tukar mengambang bebas yang secara global mulai diterapkan sejak tahun 1973. Sistem nilai tukar mengambang bebas adalah nilai tukar yang ditentukan oleh keseimbangan antara permintaan dan penawaran kedua mata uang yang bersangkutan, tanpa intervensi luar termasuk dari otoritas moneter negara yang bersangkutan.

⁷⁸ Hamdy Hady, *op-cit*, hal. 53

⁷⁹ Kavaljit Singh, *op-cit*, hal.151-152

Memang pada mulanya depresiasi terhadap Rupiah yang terjadi diduga imbas dari krisis moneter yang terjadi di Thailand, yang telah menghempaskan nilai mata uang Bath. Namun hal ini di respon secara berlebihan oleh otoritas moneter dengan mengumumkan pelebaran kurs intervensi rupiah terhadap US dolar, maka dari sejak itulah para spekulasi pedagang mata uang “bermain” untuk menjatuhkan nilai rupiah.⁸⁰

Bersama-sama dengan para pengusaha yang khawatir terhadap utang “*offshorennya*” (jangka pendek) yang jatuh tempo tanpa *hedging* itu, para spekulasi asli mulai memborong US dollar dengan memakai rupiah yang menyebabkan turunnya nilai mata uang rupiah. Ini terjadi karena para spekulasi tersebut mengetahui dengan persis bahwa jumlah cadangan devisa yang dimiliki oleh Indonesia sebesar US\$ 21 milyar itu masih lebih rendah dibandingkan utang-utang *offshore* swasta nasional yang telah jatuh tempo. Dengan mempelajari angka-angka defisit neraca transaksi berjalan yang juga tinggi, rupanya kaum spekulasi asli itu seolah-olah mendapatkan posisi startegis dalam melancarkan serangannya.⁸¹

Dengan keadaan demikian maka otoritas moneter Indonesia tidak mempunyai pilihan lain untuk mendongkrak nilai rupiah terhadap US\$ dengan memperbesar pasokan dolar atau mengirit aliran rupiah ke pasar uang, dan ini jelas memerlukan cadangan devisa (dolar) yang cukup. Namun pengalaman menunjukkan bahwa melayani kekuatan-kekuatan yang terbentuk di pasar uang ternyata dapat menguras habis cadangan devisa suatu negara. Hal ini terjadi karena dalam sistem ekonomi yang terbuka, dimana setiap mata uang dari negara manapun hanya menjadi komoditi di pasar uang dunia dan kekuatan pasar, lewat tarik menarik kekuatan penawaran dan permintaan yang merupakan hal yang utama di pasar valuta asing.⁸²

Spekulasi valuta asing timbul disebabkan karena adanya pihak-pihak tertentu yang ingin meraih keuntungan materiil ataupun immateriil. Krisis moneter yang terjadi di Indonesia pada mulanya merupakan *test case* dari manajer dana (*fund*

⁸⁰ Tony A. Prasetiantono, *op-cit*, hal. 44

⁸¹ *Ibid*, hal. 44-45

⁸² *Ibid*

managers) berskala global terhadap mata uang negara-negara Asia; dari Baht Thailand, Ringgit Malaysia, Dolar Singapura, Rupiah Indonesia, Won Korea, Peso Philipina, Dolar Hongkong, dan Yen Jepang serta Yuan Cina. Investor global bermain di sekeranjang mata uang tersebut untuk mencoba meraih keuntungan. Lalu disusul dengan gelombang spekulasi valas oleh masyarakat domestik. Guncangan kemudian melanda perekonomian domestik, sehubungan dengan perubahan nilai tukar yang drastis.⁸³

Menurut John Maynard Keynes (*The general theory of the employment, interest and money, 1936*) spekulasi adalah salah satu motif penggunaan uang selain sebagai alat tukar-menukar (*medium of exchange*) uang juga berfungsi sebagai alat penyimpanan nilai atau daya beli (*store of value*) sebagai satuan hitung (*unit of account*) serta ukuran pembayaran masa depan (*standard of deferred payments*).⁸⁴

Adalah suatu kenyataan bahwa uang pada saat ini tidak lagi sebagai alat tukar saja, tetapi sudah sebagai alat tukar yang diperdagangkan (dalam bursa valuta asing) dan ditarik keuntungan (*interest*) alias bunga atau tiba dari setiap transaksi peminjaman atau penyimpanan uang.⁸⁵

Secara makro sebuah tatanan ekonomi masyarakat yang ditopang dengan sistem ribawi (Sistem kapitalis pasar uang dan sistem utang yang dikenai bunga) tidak akan pernah betul-betul sehat. Kalaupun suatu ketika tampak sehat, sesungguhnya ia sedang menuju titik kolaps setelah mencapai puncaknya dari sebuah siklus krisis ekonomi, dimana kemajuan ekonomi yang dialami terus menerus selama beberapa tahun akan membalik dan terhenti. Bunga bank merupakan salah satu sumber labilitas perekonomian dunia.

Sektor non-riil atau moneter adalah sektor yang sarat dengan spekulasi. Kekacauan di sektor ini menyebabkan kekacauan di sektor riil (produksi, perdagangan dan jasa). Harga barang dan jasa naik bukan karena hukum permintaan

⁸³ Indra Ismawan, *op-cit*, hal. 117-118

⁸⁴ *Ibid*

⁸⁵ Ismail Yusanto, *loc-cit*

dan penawaran (*supply and demand*), tetapi karena suku bunga perbankan yang naik dan rupiah yang terdepresiasi. Dalam hal ini bunga bank memang selalu akan memberikan tekanan terhadap kegiatan perekonomian maka dengan sendirinya jelas pula bahwa sistem perbankan dengan bunga sangat berpengaruh terhadap bergairah atau tidaknya serta sehat tidaknya kegiatan ekonomi masyarakat.⁸⁶



⁸⁶ *Ibid*, hal. 8

BAB III

Implikasi dan Dampak Negatif yang Ditimbulkan Akibat Gejolak Moneter di Indonesia

3.1. Memburuknya Perekonomian Indonesia (Krisis Ekonomi).

Setiap fenomena hampir selalu memunculkan dua sisi yang kontradiktif. Disatu pihak, globalisasi membuka peluang yang lebih luas dan terbuka bagi peningkatan perdagangan dan investasi yang pada gilirannya memperluas lapangan pekerjaan. Dilain pihak, globalisasi membawa implikasi pada iklim persaingan yang semakin tajam baik di pasar domestik maupun internasional.

Sejalan dengan semangat globalisasi, sejak tahun 1970-an, Indonesia menerapkan kebijakan ekonomi liberal. Dengan rekening modal yang terbuka, Indonesia menerapkan berbagai program reformasi dibidang perdagangan, valuta asing, investasi dan sektor keuangan pada tahun 1983, yang kemudian diikuti dengan serangkaian reformasi lain pada akhir tahun 1980-an dan awal 1990-an. Reformasi-reformasi ini lebih menekankan deregulasi suku bunga, wewenang bank sentral yang dibatasi, pembukaan pasar uang untuk bank-bank dan para investor asing, serta mengurangi pembatasan terhadap perbankan asing. Jika dibanding negara-negara lain di kawasan ini, Indonesia mempertahankan suku bunga yang tinggi untuk menarik modal asing.⁸⁷

Namun apa yang telah diterapkan dan dijalankan oleh pemerintah Indonesia lewat kebijakan-kebijakan deregulasi – yang linier dengan semangat globalisasi – bukannya malah menguntungkan dengan tercapainya kesejahteraan yang merata melainkan *counter productive* terhadap pemerataan tersebut. Pertumbuhan ekonomi memang sempat dicapai oleh karena adanya reformasi di bidang keuangan tersebut, namun yang terjadi hanyalah bersifat semu. Hanya segelintir orang saja yang dapat

⁸⁷ Kavaljith singh, *op-cit*, hal. 91

menikmatinya dan itupun banyak diwarnai oleh fenomena misalokasi tindakan-tindakan spekulatif yang tidak memaksimalkan pertumbuhan pada sektor riil.

Sistem globalisasi finansial yang memang pada dirinya *self destructive* ternyata pada akhirnya hanya melahirkan efek-efek yang tidak menyenangkan bagi Indonesia yaitu gejolak atau krisis moneter – akibat dominasi mata uang asing (dolar) – telah memperburuk perekonomian Indonesia yang tidak hanya berakibat pada kehancuran sendi-sendi ekonomi tapi juga sektor sosial dan politik. Krisis mata uang dengan relatif cepat menjalar menjadi krisis ekonomi.

Akibatnya secara luas adalah terjadinya kebangkrutan dunia usaha yang semakin merebak, *lay off* (pemberhentian) kaum pekerja meningkat, inflasi melesat naik, pertumbuhan ekonomi yang praktis berhenti dan keresahan sosial pun semakin meluas.

liberalisasi arus permodalan internasional (globalisasi keuangan) telah menyebabkan Indonesia menjadi sangat tergantung pada pinjaman-pinjaman luar negeri yang tinggi bila dibandingkan pada dekade sebelumnya sehingga sejumlah perusahaan Indonesia telah menikmati utang luar negeri dalam jumlah besar sebelum terjadinya krisis mata uang rupiah dan dengan jatuhnya rupiah tentunya mengandung konsekuensi bahwa perusahaan-perusahaan domestik tersebut mengalami kerugian-kerugian yang sangat besar. Biaya untuk pengembalian utang tersebut kini telah menjadi lebih dari dua kali dalam mata uang rupiah, naik secara substansial. Dan ini akan memaksa perusahaan-perusahaan untuk melakukan penjadwalan kembali utang mereka atau bangkrut.

Merosotnya nilai rupiah mengancam para investor ekuitas angkat kaki, karena mereka memperkirakan keuntungan yang akan merosot. Karena takut akan gelombang kredit macet, modal pembiayaan bank pun menurun tajam. Indeks gabungan bursa efek jakarta merosot 47 % dalam mata uang rupiah dalam tahun 1997 sama dengan 78 % jika diperhitungkan dalam depresiasi rupiah. Di Indonesia, 16 bank dilikuidasi dan lebih dari separuh konglomerat utama yang berjumlah 43

menderita kerugian karena selisih kurs yang melampaui proyeksi penghasilan mereka tahun 1997.⁸⁸

Persoalan ini bertambah berat ketika negara-negara berkembang seperti Indonesia dihadapkan pada globalisasi dan tuntutan dunia internasional untuk meliberalisasikan perekonomian yaitu adanya biaya sosial dan politik yang terjadi akibat terbukanya pasar barang dan pasar finansial. Liberalisasi barang dan jasa serta modal membuat posisi pekerja dan serikat pekerja kian lemah. Salah satu dampak yang segera mencuat dalam krisis ekonomi yang diderita bangsa Indonesia juga terlihat secara gamblang pada tingkat pengangguran.⁸⁹

Tingginya tingkat pengangguran bisa terjadi karena disebabkan dua hal yaitu karena *first job seeker*, yaitu yang baru menamatkan sekolah menengah dan tinggi, yang tidak tertampung dan memperoleh pekerjaan dan para pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja sebagai akibat dari krisis dan penurunan produksi dari seluruh kegiatan ekonomi serta bentuk dari "pengencangan ikat pinggang" yaitu *re-schedulling*/penundaan proyek-proyek pemerintah maupun swasta dan *cost efficiency* yang diterapkan diberbagai bidang.⁹⁰

Menurunnya perekonomian telah menimbulkan pemutusan hubungan ribuan pekerja di kota-kota industri utama seperti Jakarta, Bandung dan Surabaya. Sebagai contoh, hampir 15% dari dua juta pekerja tekstil di Indonesia mengalami pemutusan hubungan kerja karena devaluasi rupiah telah menaikkan harga kapas yang digunakan dalam industri garmen. Sebab lainnya yang perlu diperhatikan adalah kehidupan ribuan pekerja konstruksi yang terkena pemutusan hubungan kerja ketika

⁸⁸ *Ibid*, hal. 93

⁸⁹ Faisal Basri, *op-cit*, hal. 30-36

⁹⁰ *ibid*

ambroknnya bisnis real estate. Diperkirakan pengangguran cenderung meningkat hingga 11 persen.⁹¹

Devaluasi dan depresiasi rupiah telah menyebabkan kenaikan tajam inflasi, yang berarti melonjaknya biaya hidup mayoritas penduduk. Dalam mata uang rupiah keinginan dana moneter internasional untuk menghapus monopoli pemerintah, yang sebagian memiliki komoditi substitusi impor akan menyebabkan lonjakan harga antara 250-500% untuk barang-barang seperti gula, kacang kedelai dan tepung terigu. Harga barang-barang kebutuhan pokok diperkirakan akan naik jika pemerintah Indonesia menerima persyaratan dana moneter internasional (IMF) untuk tidak mensubsidi bahan bakar minyak, listrik dan subsidi lain mulai bulan April 1998, krisis pangan mengancam Indonesia dan produksi bahan makanan sangat terpukul lebih-lebih ditambah oleh musim kemarau yang panjang.⁹²

Para pekerja yang masih dapat menyelamatkan pekerjaannya pun merasa sulit untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokoknya, karena daya beli mereka telah merosot drastis. Mereka tidak dapat menuntut kenaikan upah pada saat harga-harga membumbung tinggi, karena ancaman pemutusan hubungan kerja menghadang mereka.

Merosotnya nilai rupiah ini akhirnya telah menyebabkan rupiah terdepresiasi sangat tinggi, nilai rupiah turun terhadap dolar sehingga agar rupiah tidak terus jatuh pemerintah lewat otoritas moneter mengeluarkan kebijakan *tight money policy* yaitu menarik jumlah uang yang ada dimasyarakat atau yang beredar dan memperketat likuiditas dengan menaikkan suku bunga bank Indonesia (SBI). Hal ini telah menyebabkan rupiah langka di pasaran, orang tidak ada yang menabung sehingga bank-bank pun mengalami kesulitan dana karena tidak ada kas yang masuk dan tidak ada rupiah yang harus diputar. Untuk itulah, akhirnya, untuk menarik minat masyarakat untuk menabung atau menarik dana dari masyarakat, bank-bank

⁹¹ Kavaljith Singh, *op-cit*, hal. 95

⁹² *ibid*, hal. 93-94

komersial terpaksa menaikkan suku bunganya baik pinjaman maupun simpanan. Karena suku bunga yang naik ini maka terdapat konsekuensi-konsekuensi logis yaitu;

Pada sektor properti, karena suku bunga pinjaman naik, banyak proyek properti yang terbengkalai, terhenti ditengah jalan atau tidak laku, lantaran pengusaha dan konsumen tak mampu lagi meminjam uang ke bank dengan beban bunga yang cukup tinggi. Akhirnya ratusan ribu buruh dan karyawan sektor properti kehilangan pekerjaan. Belum terhitung para pemasok, tukang dan para pembantu tukang yang bila dijumlahkan angkanya bisa mencapai jutaan orang yang akan terkena dampak dari krisis ekonomi sekarang ini. Hal ini jelas akan menambah jumlah pengangguran. Ditambah yang kena PHK dari sektor garmen, tekstil, dan industri lain. Pengangguran terbuka diperkirakan jumlahnya mencapai 6,5 juta orang. Para konsumen yang telah membeli rumah juga terkena dampaknya. Biaya cicilan rumah mendadak naik sekitar 30 sampai 40 % seiring dengan kenaikan suku bunga pinjaman. Yang semula nilai cicilan hanya puluhan ribu per bulan, menjadi Rp.200 ribuan; yang semula Rp. 900 ribu menjadi Rp. 1,1 juta; bahkan ada yang semula Rp.1,2 juta menjadi Rp.2,5 juta. Bila menurut aturan, cicilan rumah tidak boleh lebih dari 30 persen jumlah gaji pemilik rumah, dengan kenaikan itu cicilan rumah telah memakan hingga 80 persen gaji.⁹³

Sektor otomotif juga terpukul, angka penjualan mobil terus menurun. Bila bulan agustus 1997 diawal krisis, menurut ketua gabungan industri kendaraan bermotor Indonesia (GAIKINDO) Herman z. latif, terjual 43.000 unit mobil dari berbagai merek, bulan september hanya 35.000 unit. Bulan-bulan berikutnya ternyata memang terus menurun. Apalagi pengusaha otomotif dengan terpaksa menaikkan harga mobil sekitar 10 persen, suatu langkah yang sulit dihindari karena ongkos produksi dan biaya penyediaan komponen impor terus melonjak seiring meningkatnya nilai dolar.⁹⁴

⁹³ Ismail Yusanto, *op-cit*, hal. 5-6

⁹⁴ *ibid*, hal. 6

Kondisi serupa juga dialami oleh pengusaha retail. Akibat lonjakan dolar, biaya sewa gedung juga turut naik. Ini memukul para penyewa gedung karena harus membayar sewa gedung yang semakin mahal. Sementara penjualan produk non makanan terus menurun. Akibat kenaikan nilai tukar dolar harga kertas juga ikut naik. Bahkan sampai hampir tiga kali lipatnya. Harga kertas hvs, buku tulis dan buku bacaan melejit makin tak terjangkau. Akibat selanjutnya, tak terhindarkan proses pencerdasaan rakyat terhambat, alias rakyat akan menjadi makin bodoh.

Sementara itu, harga-harga kebutuhan pokok juga mengalami kenaikan. Minyak goreng di pasar lontar tanjung priok jakarta yang semula Rp.2000/ kg naik menjadi Rp. 3500/kg. Satu kilo cabai keriting harganya Rp.6000, semula Rp.4000. Sedang harga sayur mayur juga kebutuhan pokok lain antara Rp.100-Rp.200. Di yogyakarta, beras yang semula Rp.1150/ kg menjadi Rp.1300/kg ; daging naik dari Rp.10.000/kg menjadi Rp. 12500/kg. Begitu juga kebutuhan pokok lain, kenaikan barang-barang kebutuhan pokok agaknya merata terjadi di seluruh wilayah tanah air.⁹⁵

Dengan berbagai fenomena-fenomena tersebut, akhirnya, krisis ekonomi yang telah terjadi ini berpotensi besar mengancam puluhan juta penduduk Indonesia untuk kembali terpuruk hidup dibawah garis kemiskinan dan juga berpotensi untuk memunculkan orang-orang miskin baru. Pemicu utamanya adalah meroketnya harga-harga kebutuhan pokok, terutama pangan. Hal ini karena ternyata unsur pangan didalam perhitungan angka garis kemiskinan teramat dominan, yaitu lebih dari 80%. Akibatnya kenaikan harga pangan menjadi sangat peka terhadap perubahan jumlah orang miskin. Meroketnya harga-harga berbagai barang dan jasa telah menjadi kenyataan

⁹⁵ *ibid*, hal.7

3.2. Hilangnya kepercayaan (Permasalahan Ekonomi-Politik yang Ditimbulkan)

Terus merosotnya nilai Rupiah akibat depresiasi nilai tukar telah mengakibatkan hilangnya kepercayaan baik dari dalam (rakyat Indonesia) maupun dari luar. Indikasi hilangnya kepercayaan dari luar adalah adanya fenomena ditolaknya L/C (*letter of credit*) yang dikeluarkan bank-bank swasta nasional devisa, penolakan ini mengandung substansi adanya kecemasan pihak mancanegara bahwa importir Indonesia tidak sanggup membayar klaim mereka. Walaupun importirnya sudah bersedia, ada kesangsian dari pihak luar apakah bank-bank Indonesia akan mampu mengucurkan US\$ bagi mereka. Hal ini disebabkan adanya *rush* dolar di perbankan yang telah menguras valas di bank-bank yang bersangkutan.⁹⁶

Krisis moneter telah menyebabkan defisit transaksi berjalan karena walaupun nilai rupiah telah amblas tetap tidak bisa menaikkan kinerja ekspor tetapi faktor kredit macetlah yang menjadi faktor utamanya, karena ekspor berkaitan dengan preferensi konsumen di luar negeri. Padahal defisit transaksi berjalan akan menguras cadangan devisa, salah satu determinan bagi perkembangan kepercayaan dunia usaha yang sedang mengalami gejala krisis.⁹⁷

Akibat globalisasi finansial ini terhadap perasaan kebangsaanpun (nasionalisme) sangat substansial. Pengalaman terakhir di Indonesia menunjukkan bahwa arus uang panas ini dapat memecah belah dan menimbulkan dampak (krisis) politik yang signifikan.

Hancurnya kredibilitas pemerintah - ditandai jatuhnya rejim orde baru - yang beriringan dengan memburuknya serba ketidakpastian telah menyebabkan terkikisnya kepercayaan (*trust*). Yang kini terjadi tidak hanya pudarnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan sebaliknya, melainkan juga antara kalangan luar negeri dengan pemerintah serta diantara sesama kelompok masyarakat. Yang terakhir tercermin dari kebringasan massa terhadap simbol-simbol kekuasaan serta kemewahan dan terhadap kelompok etnis Cina.

⁹⁶ Indra Ismawan, *op-cit*, hal. 24-25

⁹⁷ Kompas, 18 Oktober 1997

Dalam konteks politiknya yang lain, globalisasi keuangan ini telah menyebabkan otonomi negara semakin berkurang atau bahkan hilang sama sekali. Ini ditandai dengan menurunnya pengawasan dan kemampuan pemerintah dalam melakukan manuver-manuver politik yang berhadapan dengan rejim keuangan global (sistem globalisasi keuangan). Dengan kenyataan yang demikian ini pemerintah mengalami kesulitan untuk melakukan intervensi guna menekan volatilitas dan memelihara stabilitas di pasar finansial. Contoh yang sederhana dalam hal ini adalah ketidakmampuan pemerintah dalam membuat kebijakan (undang-undang) untuk meredam tindakan spekulatif baik yang dilakukan oleh penduduk lokal maupun dari luar.

Dalam kerangka global yang baru ini elit trans-nasional (*fund managers* besar) yang didukung lembaga-lembaga supranasional, seperti Dana Moneter Internasional, Bank Dunia, dan WTO, mengambil alih perumusan kebijakan-kebijakan tersebut khususnya yang terkait dengan pengelolaan perekonomian untuk kepentingan kaum elit trans-nasional tersebut. Ini adalah anti-demokrasi karena tanpa pertanggungjawaban pada masyarakat luas. Dengan kata lain sistem ini tidak memberikan kesempatan bagi hak-hak demokrasi rakyat dan demokrasi pengambilan keputusan.

Jadi dapat dikatakan bahwa elit trans-nasional dan lembaga-lembaga supra nasional yang mengendalikan kekuasaan politik dan ekonomi pada tingkat global dan nasional. Dalam kasus Indonesia globalisasi keuangan ini telah menyentuh sistem dan institusi negara, sehingga bisa mensubordinasi sistem sosial politik, Institusi parlemen, kepresidenan, sistem pemilihan umum dan institusi sosial politik lainnya.⁹⁸

⁹⁸ sebagai contoh, krisis moneter ini telah menumbangkan rejim orde baru yang berkuasa dan menimbulkan apa yang dinamakan orde reformasi serta menimbulkan ekses-ekses sosial politik lainnya (reformasi politik) seperti pemilu dan Sidang Istimewa yang dipercepat, amandemen UUD 45, didirikannya partai-partai baru dsb.

Kenyataan ini semakin diperjelas dengan fakta bahwa pada bulan-bulan terakhir kejatuhan suharto, ketika secara mendadak sebuah lobi yang terdiri dari perusahaan-perusahaan trans-nasional, Dana Moneter Internasional, Media Internasional, dan para pemimpin politik meminta tanggung jawab Soeharto atas krisis ekonomi di Indonesia dan memaksanya untuk turun dari jabatannya.⁹⁹

Sementara itu krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah terlihat dari respons masyarakat yang kerap berlawanan dengan tujuan dari berbagai kebijakan yang ditempuh pemerintah. Suatu kebijakan pemerintah yang berupaya menggiring ekspektasi masyarakat ke arah kanan justru menimbulkan reaksi masyarakat ke arah kiri dan sebaliknya. Hal ini terutama disebabkan oleh persepsi yang mengakumulasi di benak masyarakat terhadap berbagai langkah pemerintah yang tak jelas arah dan tujuannya, ketidakkonsistenan pemerintah dan langkanya suri tauladan dari para pemimpin bangsa. Faktor lainnya adalah semakin timpangnya distribusi pendapatan dan kekayaan sehingga mengakibatkan lunturnya solidaritas sosial.

Krisis moneter sejak pertengahan 1997 telah membawa dampak yang begitu luas dan mendalam terhadap kondisi sosial ekonomi dan politik masyarakat Indonesia, krisis ekonomi telah berkembang menjadi krisis politik, yaitu hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang bersumber dari meluasnya praktek-praktek korupsi dan kolusi yang semakin tak terkendali, dengan semakin memburuknya situasi ekonomi dan politik itu, legitimasi kekuasaan Presiden Soeharto semakin dipersoalkan. Bahkan orang-orang yang selama itu dianggap dekat dengan Presiden Soeharto pun mulai meninggalkannya. Gelombang demonstrasi mahasiswa, didukung oleh berbagai elemen kekuatan masyarakat, akhirnya memaksa Presiden Soeharto untuk mengakhiri kekuasaannya pada 21 Mei 1998. Pemerintahan baru Presiden B.J Habibie masih dihadapkan pada berbagai persoalan yang semakin kompleks terutama persoalan legitimasi. Presiden B.J Habibie dipandang sebagai

⁹⁹ The Economist, 17 Januari 1998, dalam Kavaljit Singh, *op-cit*, hal. 157

“kepanjangan tangan” dari mantan Presiden Soeharto dan oleh karenanya tidak “populer” untuk mengatasi ketidakpastian ekonomi dan politik.¹⁰⁰

3.3. Ketergantungan Terhadap IMF dan World Bank Serta Bantuan Asing Dalam Bentuk Program Talangan

Krisis mata uang yang terjadi di Indonesia telah menyebabkan Indonesia kekurangan dana dan harus melibatkan IMF guna menanggulangi krisis ekonomi tersebut. Campur tangan IMF akhirnya diperlukan guna menanggulangi krisis ekonomi dan juga karena krisis tak kunjung selesai. Adanya suatu kebijakan untuk memecahkan masalah krisis dengan meminta bantuan IMF. Sebagai contoh, Indonesia mendapatkan bantuan sebesar 23 milyar dolar.

Pemerintah meminta IMF dan Bank Dunia untuk membantu upaya mengatasi gejolak rupiah yang berlebihan selain menjajaki dukungan dana jangka panjang dari badan-badan internasional. Pengamat perbankan dan juga komisaris Bank Sertivia, Rijanto, menilai langkah untuk meminta bantuan IMF dan Bank Dunia banyak mengandung nilai positif terutama dalam upaya memulihkan kepercayaan masyarakat dan dunia usaha.¹⁰¹

Pemerintah tampaknya melihat bahwa dengan melibatkan IMF dan Bank Dunia maka diperoleh dukungan yang kuat dari lembaga yang mempunyai kredibilitas tinggi. Pande Radja Silalahi, Ekonom dari CSIS menilai bantuan itu secara psikologis positif karena dengan memperkuat *standby loan* (pinjaman jangka panjang yang menjadi devisa) pemerintah dapat menenangkan masyarakat dan

¹⁰⁰ Ignasius Ismanto, 1999, *Indonesia: Jalan Panjang Menuju Pemulihan Ketidakpastian Ekonomi-Politik*, Analisis CSIS, tahun xxviii, no. 3

¹⁰¹ *Bisnis Indonesia*, 9 Oktober 1997

menciuatkan nyali spekulasi. Namun demikian ia menyarankan pemerintah untuk memperhatikan persyaratan bantuan agar jangan terlalu keras.¹⁰²

Indonesia, akibat krisis moneter, telah meminta bantuan kepada dana moneter internasional guna mendapatkan program talangan sehubungan dengan krisis mata uang yang dialaminya. Indonesia mendapatkan 23 milyar dolar dalam bentuk pinjaman, dari jumlah ini kontribusi IMF adalah 10 milyar. Selain IMF, Bank Dunia, *US treasury*, para investor institusional dan bank-bank trans-nasional terlibat dalam program talangan ini.¹⁰³

Namun agaknya perlu dijelaskan di sini bahwa apa yang dilakukan oleh IMF dan institusi-institusi lainnya lewat program talangan untuk membantu Indonesia bisa membuat *counter productive* bagi pemulihan ekonomi akibat krisis moneter. Hal ini karena program talangan tersebut telah didasarkan atas asumsi yang salah. **Pertama**, bahwa krisis mata uang yang terjadi sebenarnya timbul bukan semata-mata karena persoalan fundamental ekonomi yang lemah tetapi juga karena arus modal jangka pendek yang sifatnya spekulatif dan mudah menguap dan karenanya yang harus dipermasalahkan adalah para investor dan bank-bank komersial yang menyalurkan dana tersebut dalam bentuk modal dan investasi jangka pendek. Yang **kedua** yaitu bahwa penerima pinjaman domestiklah yang bertanggung jawab terhadap beban utang luar negeri yang berat. Peranan pemberi pinjaman di luar negeri dalam kasus terjadinya krisis ini sepertinya diabaikan. Kenyataannya, para pemberi pinjaman (bank-bank komersial) itulah yang harus lebih dipermasalahkan karena penerima pinjaman korporasi individual tidak dapat diharapkan mau mempertimbangkan pola jatuh tempo total utang luar negeri sebuah negara dalam pengambilan keputusannya. Dalam transaksi utang internasional apapun, para pemberi pinjaman seharusnya menganalisa resiko-resiko perdagangan dan politik dalam penentuan distribusi jatuh tempo utang luar negeri suatu negara. Mereka seharusnya memperkirakan secara tepat *transfer risk* (resiko yang timbul jika proyek tertentu mengalami kekurangan

¹⁰² *ibid*

¹⁰³ Kavaljit Singh, *op-cit*, hal. 102

devisa untuk menutup kewajiban utang luar negerinya). Jika mereka melakukan kesalahan, maka mereka harus menanggung akibatnya, seperti investor lainnya. Dengan demikian, krisis pinjaman yang berlebihan ini disebabkan baik oleh kreditur maupun debitur. Tetapi dalam program-program talangan, debiturlah yang terutama dibebankan berbagai persyaratan berat.¹⁰⁴

Jika para kreditur tidak dipaksa untuk menanggung akibat dari pinjaman yang berlebihan itu, maka mereka akan terdorong untuk mencari kemungkinan-kemungkinan pinjaman baru yang tidak disiplin seperti itu. Para analis berargumen bahwa dana-dana talangan akan semakin merangsang para investor institusional untuk terus menuruti keinginannya dalam aktivitas spekulatif, yang akan mendorong terbentuknya suatu sistem keuangan internasional yang tidak stabil, dimana dana-dana dalam jumlah besar dikucurkan ke suatu negara kemudian ditarik keluar sesuka hati. Dengan demikian berarti bahwa program talangan hanyalah sebagai “jaringan penyelamatan sosial” bagi para spekulan institusional. Karena mereka tahu bahwa dana moneter internasional dan pemerintah negara selalu akan menalangi jika terjadi krisis.¹⁰⁵

Berbeda dengan krisis utang tahun 1980-an, sekarang ini utang yang ada bukan milik “negara”, tetapi milik perusahaan-perusahaan di sektor swasta yang telah banyak meminjam dari bank-bank komersial internasional. Krisis ini tidak disebabkan oleh anggaran pemerintah, tetapi oleh pasar swasta. Namun dalam program talangan, utang swasta telah dikonversikan menjadi utang negara yang harus dibayar oleh pemerintah dan rakyat secara keseluruhan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa baik pemberi pinjaman maupun penerima pinjaman swasta ditalangi dengan uang rakyat. Bank-bank komersial yang mestinya menderita kerugian karena kegagalan pelunasan pinjaman, tidak pernah akan menderita kerugian karena mendapatkan “santunan” dari program talangan. Dengan demikian, maka argumen yang sering dikemukakan untuk mendukung kebijakan pasar bebas dan liberal, bahwa

¹⁰⁴ *ibid*, hal 103

¹⁰⁵ *ibid*, hal 103-104

seharusnya tidak boleh ada intervensi dari pemerintah dalam pinjaman sektor swasta serta siapapun yang membuat kesalahan harus menanggung akibatnya, kurang berdasar dalam program talangan.¹⁰⁶

3.4 Usaha-usaha yang Dilakukan Pemerintah Indonesia dalam Mengatasi Krisis Moneter. (Masa Pemerintahan Soeharto dan Habibie)

Bermula dari turunnya nilai rupiah terhadap dolar yang semakin memburuk menjadi suatu krisis ekonomi yang berkepanjangan dan menyengsarakan rakyat Indonesia khususnya rakyat kecil. Situasi menjadi tidak menentu yang ditandai oleh hilangnya kepercayaan - baik dari masyarakat terhadap pemerintah maupun dari pihak luar - harga-harga yang membumbung tinggi, kesulitan bahan pangan, tingkat pengangguran yang tinggi, tidak adanya pertumbuhan ekonomi dan sebagainya.

Hal-hal seperti di atas tentunya membutuhkan suatu usaha pembenahan dan penanganan yang sangat kompleks karena masalahnya sendiri sangat kompleks sekali. Untuk mengatasi krisis moneter pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan, baik yang berhubungan dengan masalah moneter secara langsung maupun tidak.

Pada awal-awal krisis, ketika depresiasi rupiah merambat cepat mendekati besaran Rp. 3000,- per US\$ 1 pada bulan Juli 1997, bank sentral melepas band - kurs intervensi. Hal ini dilakukan untuk memperkuat posisi rupiah walaupun pada level yang tinggi. Pada tanggal 11 Juli 1997, pemerintah melalui Bank Indonesia memperlebar spread kurs dari 8% menjadi 12% yang berarti Bank Indonesia baru akan melakukan intervensi kurs bila nilai dolar diluar Rp. 2.678,- dari 2.374,- atau dengan ruang gerak Rp. 304,-.¹⁰⁷

Tercatat beberapa kali pemerintah mengeluarkan kebijakan moneter untuk menstabilkan nilai rupiah. Pada tanggal 14 agustus 1997, Bank Indonesia mengambangkan nilai rupiah. Ini berarti tidak ada lagi rentang kurs dan nilai tukar

¹⁰⁶ *Ibid*, hal. 104-105

¹⁰⁷ Jawa Pos, 12 juli 1997

rupiah bergerak sesuai dengan kekuatan permintaan dan penawaran di pasar uang, hal ini dilakukan karena pemerintah percaya begitu saja pada mekanisme pasar bahwa kurs rupiah terhadap valuta asing akan memasuki level yang wajar, sehingga pemerintah tidak perlu menutupi kekurangannya. Dari sini terlihat bahwa pemerintah sudah mulai kekurangan dana. Berikutnya Bank Indonesia menaikkan suku bunga SBI (Sertifikat Bank Indonesia) pada tanggal 19 Agustus 1997, karena ternyata tidak ampuh, suku bunga SBI diturunkan berturut-turut pada tanggal 4, 9, 15 dan 22 September 1997. Namun berbagai kebijakan tersebut juga tidak mampu menahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Nilai tukar rupiah sedikit terkoreksi hanya beberapa waktu ketika pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan-kebijakan itu, untuk kemudian terkoreksi kembali. Hal ini mengandung arti bahwa koreksi melalui mekanisme kekuatan-kekuatan permintaan dan penawaran dalam pasar uang telah tidak lagi mencerminkan penilaian yang objektif dari para pelaku pasar mengenai fundamental ekonomi Indonesia. Spekulasi telah memainkan peranan yang penting.

Berikutnya, pada minggu ke-4 Maret 1998, lagi-lagi Bank Indonesia memberlakukan kenaikan suku bunga SBI. Suku bunga tertinggi ditetapkan untuk SBI jangka waktu 1 bulan - yakni 45 % per tahun. Sedangkan yang terendah adalah 18% (SBI 12 bulan). Suku bunga SBI satu bulan lantas dinaikkan lagi menjadi 50% per 21 April 1998 dan 58% per 7 Mei 1998. Dengan kenaikan ini perbankan harus mengimbangi kenaikan-kenaikan suku bunga SBI dengan menaikkan suku bunga deposito agar dapat menyedot dana dari masyarakat guna memenuhi likuiditas. Sebelumnya pada minggu pertama Maret, pemerintah menetapkan batas maksimal suku bunga bank 150% terhadap suku bunga SBI. Dengan kebijakan tersebut, bank-bank bebas menaikkan suku bunganya sampai dengan 67,5% (atau 45% dikalikan 150%). Bank-bank pemerintah langsung menetapkan suku bunga deposito 1 bulan sebesar 67,5%. Dengan demikian aliran dana mengalir deras ke sistem perbankan dengan tujuan: 1. meredam spekulasi valas - karena pemegang dolar akan menukarkan dolarnya ke mata uang rupiah - kemudian menempatkannya pada sistem perbankan di Indonesia, tujuannya jelas, ingin meraih keuntungan berupa suku bunga

riil yang amat besar. 2. Merangsang *capital inflow* dalam bentuk penempatan dana asing di perbankan domestik dan ke 3. Adalah motif pengendalian inflasi.

Upaya lain yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah dengan melakukan suatu gerakan moral yaitu aksi gerakan cinta rupiah. Masyarakat di himbau untuk menukarkan dolarnya dan menyumbangkan emasnya kepada negara. Untuk memperkuat cadangan devisa, pemerintah juga melakukan beberapa hal strategis, antara lain berunding dengan dana moneter internasional (IMF), mempersiapkan privatisasi BUMN, memberikan fasilitas *swap* (kombinasi transaksi antara spot dan forward) kepada para eksportir serta *forward* kepada para importir yang merangkap eksportir dan bahkan menurunkan giro wajib minimum dalam valuta asing bagi perbankan.

Walaupun faktor awalnya hanya sebuah depresiasi mata uang namun untuk menyelesaikan masalah yang sudah akut menjadi situasi krisis ekonomi ini juga diperlukan penyelesaian masalah lain yang walaupun seperti kelihatannya tidak berhubungan namun sangat bermakna dalam usaha memperbaiki krisis ini.

Untuk itulah diperlukan langkah-langkah lain untuk memperbaiki krisis tersebut, seperti yang telah disebutkan terlebih dahulu bahwa Indonesia ternyata harus melibatkan IMF guna menanggulangi krisis ekonomi ini. Namun ternyata IMF meminta prasyarat-prasyarat tertentu yang harus dilakukan Indonesia apabila Indonesia ingin secepatnya keluar dari situasi krisis ekonomi ini. Secara garis besar permintaan IMF ini - yaitu apa yang dinamakan *letter of intent* - dimaksudkan agar Indonesia melakukan pembenahan-pembenahan menyeluruh terhadap ketidak-efisienan pengelolaan ekonomi dan ketidakberesan dalam masalah politik. Usaha-usaha ini akhirnya dapat dibagi dua menjadi dua hal yaitu Indonesia harus melakukan suatu reformasi ekonomi dan politik

Seperti yang tertuang dalam nota kesepakatan (LOI) tersebut, Indonesia diharuskan melaksanakan point-point yang telah disepakati. Dalam hal ini tindakan yang telah dilakukan Indonesia adalah 1. penyehatan makro ekonomi melalui restrukturisasi sektor perbankan dan sektor swasta yaitu dengan melikuidasi 16 bank

swasta nasional dan penggabungan (merger) bank-bank pemerintah agar tercapai dunia perbankan yang sehat dan efisien, 2. Merevisi APBN dengan parameter baru, 3. Membatasi pengeluaran negara untuk proyek-proyek yang tidak vital, 4. Menghentikan dana anggaran untuk program IPTN, 5. Mencabut segala bentuk perlakuan khusus dalam bidang bea cukai serta fasilitas kredit bagi proyek mobil nasional, 6. memberikan otonomi kepada Bank Indonesia dalam menerapkan kebijakan-kebijakan moneter, 7. membatasi monopoli bulog yaitu terbatas hanya pada beras serta menghapus monopoli impor dan distribusi untuk gula dan tepung terigu, 8. menghapus segala aturan pemasaran sehingga perusahaan bebas memproduksi serta mengeksport sesuai permintaan pasar, dan 9. menghapus kartel semen, kertas dan kayu lapis.¹⁰⁸

Reformasi politik dilakukan dengan melaksanakan sidang istimewa pada tanggal 11-16 november 1998 yang hasilnya memuat berbagai tuntutan-tuntutan dalam bidang politik sehingga dapat menjadi jawaban atas ketidakpastian politik, keefektifan serta keadilan, kesebelas ketetapan tersebut meliputi:

1. Ketetapan mengenai masa jabatan presiden.
2. Ketetapan mengenai pencabutan TAP MPR no.V/1998 tentang pemberian tugas dan wewenang khusus pada presiden.
3. Ketetapan mengenai perubahan-perubahan dan tambahan atas TAP. MPR /1983 tentang peraturan tata tertib MPR.
4. Ketetapan mengenai pencabutan TAP. MPR no. IV/1983 tentang referendum
5. Ketetapan mengenai pencabutan TAP. MPR no. II MPR/1998 tentang GBHN.
6. Ketetapan tentang pokok-pokok reformasi pembangunan dalam rangka penyelamatan normalisasi kehidupan nasional sebagai haluan negara.
7. Ketetapan tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN.

¹⁰⁸ Warta Ekonomi, no. 36/th ix / 26 Januari 1998

8. Ketetapan mengenai penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.
9. Ketetapan tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi.
10. Ketetapan mengenai HAM.
11. Pencabutan Tap MPR no.II/1978 tentang P4.

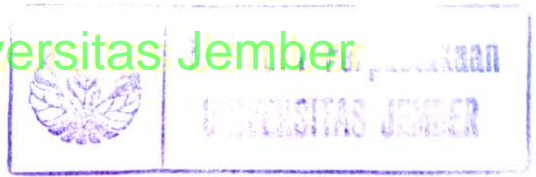
Hasil sidang istimewa ini bisa dikatakan sebagai agenda reformasi Politik yang harus dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia.¹⁰⁹

Untuk melaksanakan hasil sidang istimewa tersebut, pada tanggal 3 Desember 1998 pemerintah melakukan konsultasi dengan DPR untuk menentukan langkah pemerintah selanjutnya dalam menjalankan agenda reformasi politik. Dari kesepakatan ini dihasilkan dua keputusan, yakni mengenai jadwal pemilu dan sidang umum MPR. Pemilu direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 7 Juni dan sidang istimewa pada tanggal 24 Agustus 1998.¹¹⁰ Dengan lahirnya keputusan tersebut berarti politik Indonesia memiliki agenda yang pasti dan diharapkan mampu memberi kepastian politik.

Reformasi politik merupakan prasyarat bagi reformasi ekonomi. Keberhasilan reformasi politik akan menentukan keberhasilan pemulihan ekonomi Indonesia. Ketidakpercayaan pelaku pasar dan investor luar negeri terhadap perekonomian Indonesia lebih banyak berawal dari situasi politik Indonesia yang sedang tidak menentu.

¹⁰⁹ Kompas, 18 November 1998

¹¹⁰ Kompas, 4 Desember 1998



BAB V

Kesimpulan

Proses globalisasi finansial pada akhirnya telah menimbulkan sistem nilai tukar mengambang (*floating exchange rate*) yang menyebabkan negara-negara saling terkait dan tergantung dengan adanya integrasi perdagangan atas pasar uang. Sistem ini pada perkembangannya telah menyebabkan dampak yang tidak menguntungkan bagi Indonesia seperti krisis moneter. Ini dapat terjadi karena pemerintah telah melakukan liberalisasi dan deregulasi pasar uang serta meninggalkan pengawasan terhadap modal (sebagai akibat dan konsekwensi nilai tukar yang diambangkan).

Krisis di Indonesia yang dipicu oleh spekulasi *fund manager* dan *currency traders* sedikit banyak dapat disebabkan oleh absennya institusi governance (moral) di dalam mekanisme pasar global. Saat ini mekanisme pasar uang global merupakan pasar yang tidak stabil dan seimbang, hal ini disebabkan karena diantara para pemain (negara-negara) tersebut ada perbedaan standar efisiensi dan tingkat penguasaan teknologi sehingga terciptalah suatu sistem dengan pola-pola subordinatif. Negara berkembang seperti Indonesia tidak akan menang bila harus “bertarung” dengan negara besar karena permainan (mekanismenya) itu sendiri tidak dilaksanakan dalam suatu *level playing field*.

Secara teoritis kekuatan mekanisme dan institusi pasar mempunyai dua kelemahan mendasar. **Pertama**, Institusi pasar tanpa kehadiran institusi negara (pengaturan) dapat menghasilkan eksternalitas negatif, seperti krisis dan kerusakan lingkungan alam dan sosial akibat kegiatan ekonomi. **Kedua**, institusi pasar tidak dapat mengakomodasikan moral karena pelaku-pelaku hanya bermotifkan profit.

Untuk itulah perlu dipertimbangkan beberapa kebijakan yang mungkin dapat dijadikan solusi atas krisis tersebut. **Yang pertama**, adalah dilakukannya semacam pengawasan modal dengan segala regulasi dan supervisinya di tingkat nasional. Kedua, ditingkat global dapat dibentuk suatu institusi *governance*. Pajak tobin mungkin bisa dijadikan contoh dalam usaha mengeliminir dampak negatif di pasar

uang global. Menurut Mahatir Muhammad, kekuatan pasar global bersifat eksploitatif. **Ketiga**, yang relatif krusial adalah mencari kerangka solusi di tengah dominasi mata uang dunia. Sejauh ini pendekatan negara-negara berkembang yang diterapkan untuk menguatkan posisi mata uangnya adalah menciptakan kurs tetap (*fix rate*) seperti yang diberlakukan Malaysia. Pendekatan ini relatif proporsional tapi bersyarat ketat. Yaitu, cadangan devisanya harus besar, di samping kecil tingkat utang luar negerinya. Syarat seperti ini sulit dilakukan oleh setiap negara berkembang, apalagi Indonesia. Tantangan internal ini diperberat lagi oleh tantangan yang datangnya dari pihak eksternal. Yaitu adanya sikap tidak rela terhadap pemberlakuan nilai tukar tetap. Sikap negara-negara besar ini sebenarnya menggambarkan pengaruh para *fund manager* yang demikian kuat dalam diri birokrasi. Bagi para *fund manager*, pemberlakuan kurs tetap sama artinya hilangnya peluang (*margin*) atas permainannya di tengah naik turunnya nilai tukar sebuah mata uang.

Dengan keterbatasan-keterbatasan yang disebutkan di atas, sistem mata uang yang berbasis emas dan perak jauh lebih baik ketimbang sistem mata uang yang *fixed* atau yang mengambang (*floating*) seperti sekarang. Apalagi jika dikaitkan dengan upaya intervensi suatu negara kepada negara lain melalui sistem keuangan. Tidak dapat dipungkiri bahwa sistem keuangan internasional tidak dapat terpisah dengan sistem politiknya. Dengan demikian negara yang kuat akan terus mendominasi negara yang lemah melalui sistem mata uangnya. Tidak salah bila dikatakan inilah penjajahan dalam bentuknya yang baru. Dengan sistem mata uang emas setiap negara memiliki kekuasaan (*sovereignty*) atas mata uangnya sendiri, karena secara asasi siapapun boleh memiliki emas. Dan dengan menerapkan sistem moneter yang berdasarkan nilai emas ini, diperkirakan mata uang akan lebih stabil dan lebih tahan terhadap gejolak nilai tukar karena emas sendiri di dalamnya terkandung nilai intrinsiknya yang sangat besar.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Muflif Saefuddin, 2001, **Regionalisasi Mata Uang Dinar: Dinar Emas Solusi Krisis Moneter**, Jakarta, PIRAC, SEM Institute, INFID
- Arif Budiman, 1995, **Teori Pembangunan Dunia ke Tiga**, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka utama
- MC Clelland, A Charles, 1982, **Ilmu Hubungan Internasional**, Jakarta, CV Rajawali
- Cecep Maskanul Hakim, 2001, **Sistem Dinar Emas: Solusi Krisis Moneter**, Jakarta, PIRAC, SEM Institute, INFID
- Didik J. Rachbini, 2001, **Dalam Globalisasi adalah Mitos**, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia
- Faisal H. Basri, 1999, **Krisis Ekonomi di Tengah Gelombang Globalisasi**, Jakarta, Analisis CSIS, No. 1
- Hamdy Hady, 2001, **Valas untuk Manajer**, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Patomakki, Heikki, 1999, **Pajak Tobin: Sebuah Fase baru dalam Politik Globalisasi ?**, Jakarta, Jurnal Ilmu Sosial Transformatif, No. iv
- Indra Ismawan, 1998, **Catatan Kritis Dimensi Krisis Ekonomi Indonesia**, Jakarta, PT Elex Media Komputindo
- Iskandar Alisyahbana, 1998, **Evolusi Pembaharuan Budaya Masyarakat Global**, Jakarta, Jurnal Studi Pembangunan, Vol. 1, No. 3
- Ismail Yusanto, 2001, **Mencari Solusi Krisis Ekonomi: Dinar Emas Solusi Krisis Moneter**, Jakarta, PIRAC, SEM Institute, INFID
- Ignatius Ismanto, 1999, **Indonesia Jalan Panjang Menuju Pemulihan Ketidakpastian Ekonomi-Politik**, Jakarta, Analisis CSIS, No.3
- Frankel, Joseph, 1990, **Hubungan Internasional**, Jakarta, ANS Sungguh Bersaudara
- Singh, Kavaljit, 1998, **Memahami Globalisasi Keuangan Panduan untuk Memperkuat Rakyat**, Jakarta, Yakoma-PGI

- Kumpulan Pemikiran, 1998, **Upaya Memperkuat Rupiah**, Jakarta, PT Elex Media Komputindo
- Lexy J. Moleong, 1989, **Metodolgi Penelitian Kualitatif**, Bandung, CV Remaja Karya
- Mohtar Mas'ood, 1994, **Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi**, Jakarta, LP3S
- Mohtar Mas'ood, 1991, **Studi Hubungan Internasional Tingkat Analisis dan Teorisasi**, Jakarta
- Miriam Budiarto, 1982, **Dasar-dasar Ilmu Politik**, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama
- Hirst, Paul dan Thompson, Grahame, 2001, **Globalisasi adalah Mitos**, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia
- Viotti, R Paul dan Kauppi, V Mark, 2nd edition, **International Relation Theory, Realism, Pluralism, Globalism**, New York, Mac Millan Publishing
- Pande Radja Silalahi, 1999, **Agenda Ekonomi Pemerintahan Baru RI**, Jakarta, Analisis CSIS No. 4
- Sutrisno Hadi, 1994, **Metodologi Research**, Yogyakarta, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM
- Sigit Purnawan Jati, 2001, **Seputar Dinar dan Dirham: Dinar Emas Solusi Krisis Moneter**, Jakarta, PIRAC, SEM Institute, INFID
- The Liang Gie, 1984, **Ilmu Politik Suatu Bahasan Tentang Pengertian Kedudukan, Lingkungan dan Metodologi**, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press
- Tony A. Prasetyantono, 1995, **Agenda Ekonomi Indonesia**, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama
- Widjajono Parto Widagdo, 1999, **Perekonomian Keadilan dan Moralitas**, Jakarta, Jurnal Studi Pembangunan, Vol. II, No. 1
- Winardi Surachmad, 1975, **Pengantar Metodologi Ilmiah**, Bandung, Tarsito

Zaim Saidi, 1999, **Menimbang Kembali Uang Emas**, Jakarta, Jurnal Ilmu Sosial Transformatif No. iii

Surat Kabar dan Majalah

Jawa Pos, 12 Juli 1997

Kompas, 22 Agustus 1997

Kompas, 08 Oktober 1997

Bisnis Indonesia, 09 Oktober 1997

Kompas, 18 Oktober 1997

Kompas, 21 Oktober 1997

Bisnis Indonesia, 14 Januari 1998

Warta Ekonomi, No. 36/th.ix/26 Januari 1998

Kompas, 18 Nopember 1998

Kompas, 04 Desember 1998

Suara Karya, 12 Januari 1999

Suara Karya, 06 Februari 1999

Media Indonesia, 07 Februari 1999

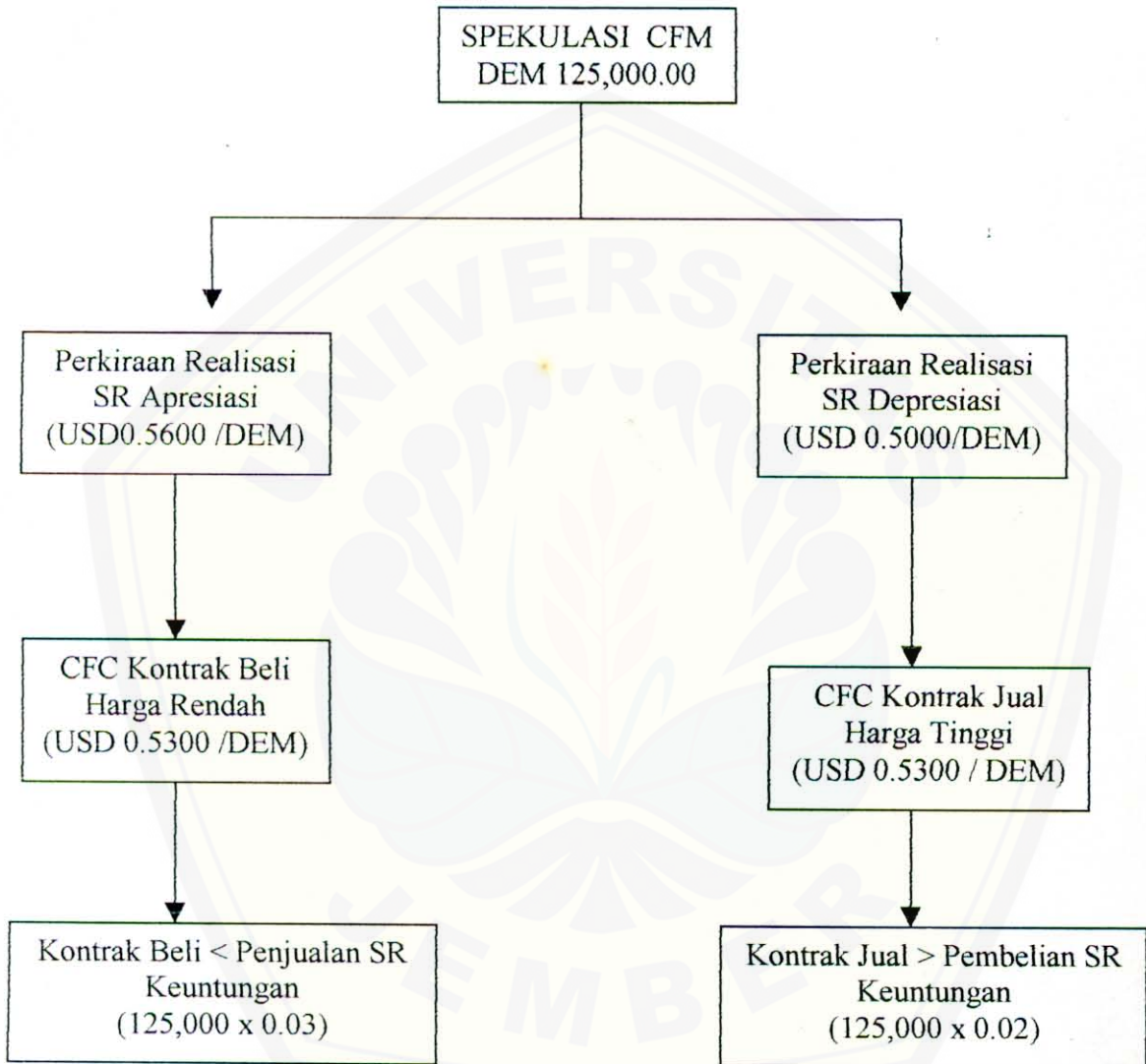
Download Internet

Tobin Tax org

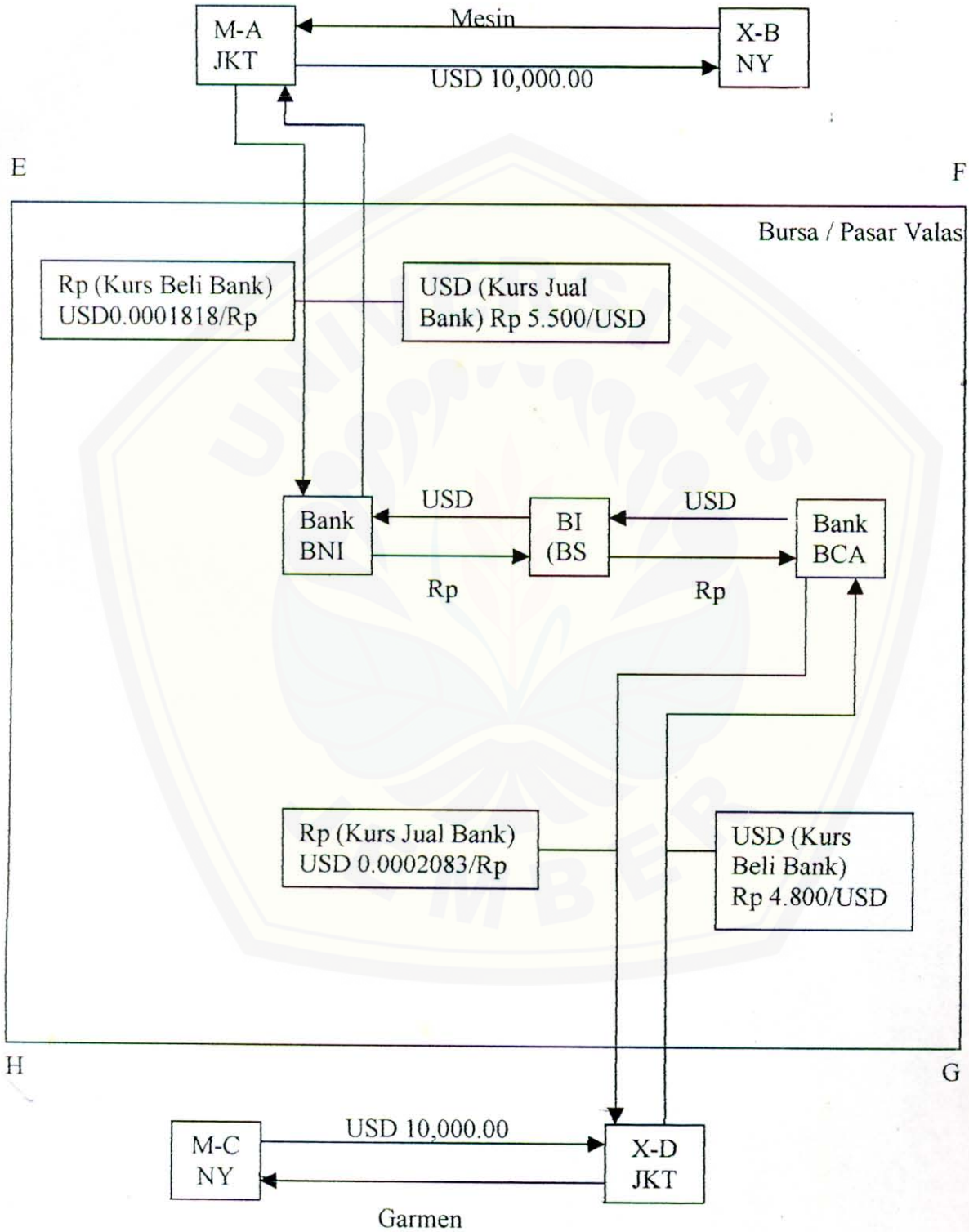
Halifax Initiative

War on Want

Tindakan Spekulator



Permintaan dan Penawaran Valas



Arus Pendapatan Bersih Pertahun diAsia

(dalam Milyar Dollar Amerika Serikat)

	1984-89	1990-96	1994	1995	1996	1997	
Arus Pendapatan Bersih		13	55.9	63.1	91.8	102.2	38.5
Investasi Langsung Bersih	4.5	32.2	43.4	49.7	58.5	55.4	
Investasi Portofolio Bersih		1.5	6.8	11.3	10.8	10.2	-2.2
Investasi Lainnya	7	16.9	8.3	31.3	33.5	-14.7	
	7.7	8.4	6.2	5.1	9.3	17.7	
	-2.1	-29	-39.7	-29	-48.9	-17.2	

Pinjaman Bank Internasional Untuk Asia

(dalam Jutaan Dollar Amerika Serikat)

	Juni 97	Des 96	Juni 96	Des 95	Des 94
Asia	389,441	367,009	337,849	306,855	241,249
Korea Selatan	103,432	99,953	88,027	77,528	56,599
Thailand	69,382	70,147	69,409	62,818	43,879
Indonesia	58,726	55,523	49,306	44,528	34,970
Philipina	114,115	13,289	10,795	8,327	6,830
Malaysia	28,820	22,234	20,100	16,781	13,493

Depresiasi Mata Uang diAsia Tenggara

Mata Uang	Tingkat Dolar per 31/1/97	Tingkat Dolar per 20/1/98	Depresiasi dalam Persen
Rupiah Indonesia	2,375	10,200	329.5
Baht Thailand	25.9	53	104.8
Won Korea Selatan	863	1,638	89.9
Ringgit Malaysia	2.4	4.1	68.2

Pertumbuhan GDP (%) – Negara-negara pilihan di Asia

	1996	1997	1998	1999	2000
Thailand	5.5	-1.3	-9.4	3	5
Indonesia	7.8	4.9	-13.2	2	4
Korea	7.1	5.5	-5.8	8	6
Malaysia	8.6	7.7	-7.5	2	3.9
Pilipina	5.8	5.2	-0.5	3	4.5

Perubahan Harga-harga Konsumsi

(Persen per Tahun)

	1996	1997	1998	1999	2000
Korea	4.9	4.5	7.5	1	3
Indonesia	7.9	6.6	64.7	12	10
Malaysia	3.5	4	5.3	3.4	3.6
Pilipina	9.1	6	9.7	7.5	7
Thailand	5.9	5.6	8.1	0.5	4

Tingkat Pengangguran 1997-1998

	1997 Tingkat Pengangguran (%)	1998 Tingkat Pengangguran (%)	Angka Pengangguran (Jutaan)
Indonesia	4.7	6.6	6.4
Malaysia	2.7	6.4	0.6
Republik Korea	2.6	7.7	1.5
Thailand	1.9	4.4	1.5

Kenaikan Tingkat Kemiskinan Akibat Krisis

Negara	Kenaikan dalam Angka kemiskinan (Jutaan)					
Indonesia	39.9	20	12.3	30.8	27.6	69.2
Republik Korea	14.5	5.5	12	4.7	85.5	0.8
Thailand	6.7	12	5.4	80.6	1.3	19.4

	1996/97	1997/98	1998/99
Pertumbuhan GDP Riil	8.2	2	-16
Harga-harga Konsumsi	5.2	12.9	65

Kenaikan Harga (Rupiah)

Komoditi	Harga, 15 Januari 1998	Harga, 15 Februari 1998
Beras (1kg)	1,800	3,500
Minyak Goreng (1 L)	2,000	5,500
Gula (1kg)	1,600	2,200
Ayam (1kg)	4,500	6,500
Susu Bubuk (1kg)	6,500	19,650
Mie Instant (1 bungkus)	300	550
Kecap (1kg)	1,500	3,500
Tarif Bis (Jakarta-Surabaya)	21,000	28,000





CENTRE FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES



Perpustakaan
UNIVERSITAS JEMBER

SURAT KETERANGAN PELAKSANAAN RESEARCH

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa:

Nama : HARTONO PRIADI SASTRA
Status : MAHASISWA HUB. INTERNASIONAL UNIV. JEMBER
Alamat : JL. KALIMANTAN IV BLOK B NO 45 JEMBER

telah melaksanakan research/survey pada Perpustakaan
Centre for Strategic and International Studies (CSIS)
dalam bidang: PENGARUH GLOBALISASI FINANSIAL TERHADAP KRISIS MONETER
DI INDONESIA DAN SOLUSINYA

untuk keperluan penyusunan skripsi.

Demikian agar yang bersangkutan menjadi maklum.

Jakarta, 28-09-2001


Soedarso
Kepala Perpustakaan